



**PERATURAN NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI
(RPJM Nag)
TAHUN 2018 – 2024**

*“Terwujudnya Nagari Yang Mandiri Berbasis Pertanian,
Mencapai Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”*

**NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Peraturan Nagari	iii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. manfaat	9
BAB II PROFIL NAGARI	12
2.1. Sejarah Nagari	12
2.2. Peta dan Kondisi Nagari	19
2.3. Kelembagaan Nagari	24
2.4. Dinamika Konflik	29
2.5. Masalah dan Potensi	32
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI	36
3.1. Pengkajian Nagari	36
3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari	71
BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)	72
4.1. Visi Nagari	72
4.2. Misi Nagari	72
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari	73
BAB V PENUTUP	81
Lampiran	
Peta Sosial Nagari	
Tabel (Matrik) Program / Kegiatan Enam Tahun	
Berita Acara dan Daftar Hadir	
SK Tim Penyusun RPJM Nagari	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan ditingkat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat Pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan dipergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada Perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan Fasilitator Kecamatan yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJM, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RPJM Nagari yang akan datang.

Tanjung Durian, September 2018

Tim Penyusun,



NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
NAGARI)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2011-2017 Telah Berakhir Sehingga Perlu Disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2018-2024;
- b. Bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan nagari guna mewujudkan visi dan misi Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Nagari dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23), Jis Undang-Undang Dri Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang_undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007

tentang Kader Pemberdayaan Kemasyarakatan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
33. Surat Edaran Bupati pesisir Selatan No 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Mengenai Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR
BARU

dan

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM Nag) TAHUN 2018-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
4. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Barnus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan

7. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.
12. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM NAGARI 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintah Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di

masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

3. Rancangan RPJM Nagari yang berasal dari Pemerintah Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintah Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari.
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari dan unsur Masyarakat.
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM Nagari

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi : Terwujudnya nagari yang mandiri berbasis pertanian, mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera

Pasal 5

Misi

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian nagari, seperti jalan, jembatan, irigasi serta infrastruktur strategis lainnya.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Nagari dan Bamus;
2. Meningkatkan pembangunan Nagari dengan memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat nagari.

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nagari;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan nagari agar nagari menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat nagari;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan nagari dan Bamus dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

1. Belanja Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
2. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Tunjangan operasional Bamus;
4. Program Operasional Pemerintahan Nagari;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program Pelayanan dasar pendidikan;
7. Program Pelayanan kesehatan;
8. Program Penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
9. Program Ekonomi Produktif;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Nagari;
11. Program Penunjang peringatan hari-hari besar;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari

Pasal 10

1. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari ini berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : Oktober 2018
Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Diundangkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : Oktober 2018
Sekretaris Nagari

YULIANTI
LEMBARAN NAGARI NOMOR 3 TAHUN 2018 NOMOR 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun. RPJMNagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ perihal Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.

Adapun untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Musrenbang Nagari dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Nagari, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Didalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari setidaknya memperhatikan beberapa hal yaitu :

- a) Persiapan meliputi analisis akar penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan pembangunan, peta sosial desun/nagari, membangun komitmen atau janji luhur nagari;
- b) Merumuskan aspek dasar kelembagaan nagari yang meliputi mandat kelembagaan nagari, analisis stakeholder (pelaku) visi dan misi nagari;
- c) Merumuskan aspek strategis pembangunan nagari yang meliputi analisis eksternal, internal, perumusan isu-isu strategis pembangunan nagari

- (kecenderungan atau trend ke depan), penyusunan isu-isu strategis pembangunan nagari (jangka pendek, menengah dan panjang) dan;
- d) Merumuskan aspek praktis perencanaan pembangunan nagari yang meliputi rencana kerja (work plan), rencana anggaran (biaya) dan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan nagari disusun secara partisipatif oleh pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari Pemerintah nagari wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan nagari.

Perencanaan pembangunan nagari disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah nagari yang selanjutnya disebut RPJMNag untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. Rencana Kerja Pembangunan nagari, selanjutnya disebut RKPNag, merupakan penjabaran dari RPJMNag untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari sedangkan RKPNag ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan nagari didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan nagari;
- c. Keuangan nagari;
- d. Profil nagari;
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Pembangunan (RPJMNag) acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi dan program kerja Wali Nagari untuk dijabarkan ke dalam Strategi pembangunan nagari, kebijakan umum, program prioritas Wali Nagari dan arah Kebijakan keuangan nagari. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMNag disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten yakni RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Rancangan RPJMNag tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnagari) Jangka Menengah nagari, dan hasil Musrenbangnagari dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir RPJMNag.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMNagari Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021,
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025,
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030,
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan,
33. Surat Edaran Bupati pesisir Selatan No 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Mengenai Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nag) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018-2024 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum nagari dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin

dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Nagari terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah (BAMUS) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBNag Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan Nagari.

1.4 Manfaat

Sebagaimana halnya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RPJMNagari disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (termasuk di dalamnya evaluasi).

Hakekat dari tujuan pembangunan Nagari adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat Nagari. RPJMNagari sebagai suatu rencana pembangunan Nagari harus melibatkan segenap komponen masyarakat Nagari didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Dokumen rencana pembangunan Nagari semestinya menerapkan prinsip-prinsip;

1. *Pemberdayaan*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. *Partisipatif*, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
3. *Berpihak kepada masyarakat*, yaitu seluruh proses pembangunan di Nagari secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. *Terbuka*, yaitu Proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Nagari untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Nagari;
5. *Akuntabel*, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Nagari maupun pada masyarakat;
6. *Lengkap*, artinya RPJM Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari;
7. *Sistematis*, artinya RPJM Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang rumit;
8. *Selektif*, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
9. *Keberlanjutan*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia sehingga setiap proses berjalan secara berkelanjutan;
10. *Cermat*, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
11. *Efisiensi dan efektif*, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

12. *Proses berulang*, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, dan
13. *Penggalian informasi*, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan Nagari dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

BAB II PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Tanjung Durian merupakan salah satu Nagari yang berada di dekat Ibu Kota Kecamatan Bayang menurut tambo perbilangan uraian adat asal usul nama Nagari Tanjung Durian bermula dari nenek moyang orang minang di Tanjung Durian, yang mata pencarian bercocok tanam padi dan berkebun Durian.

Sehingga masa dulunya banyak Batang Durian dan tanaman padi. Nagari ini banyak suku Tanjung dari pada Suku-suku lainnya seperti Suku jambak, Suku Caniago dan Suku melayu kalau dengan perbandingan 2/3 suku Tanjung, 1/3 Suku yang lain. Tetapi karena tuntutan perkembangan penduduk sekarang telah berubah seiring dengan perkembangan zaman banyak anak kamanakan banyak Batang Durian di tebang dan batangnya di jadikan Gisa untuk mengolah padi menjadi beras karena padi di Tanjung Durian sangatlah banyak, berhubung heler dan kincir air tidak ada, Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Terdapat dua aliran besar dalam sistim pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai

struktur politik dan aparat hukum tersendiri, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto, dari Koto menjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili dikawasan tersebut.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini, yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi tradisi adat, dimana jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya. Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapus sedangkan wali nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Sejarah dan ordonansi nagari di Bayang tersebut dalam "*Tambo Pembilangan Curito Adat monogarafi Yang Diuraikan Dalam Sidang Kerapatan Adat Bayang Nan Tujuh Koto dan Kerapatan Adat Koto Nan Salapan pada tahun 1915*". Kedua kerapatan ini adalah atas perintah Kepala Pemerintah di Painan, Asisten Residen, Kepala Demang Painan si Musa

Ibrahim yang disampaikan kepada Asiten Demang Bayang Sutan Tahar Baharuddin dan kepada Terumun Gelar Datuk Rajo Sutan, bekas guru pensiun yang berasal dari Kinari yang diterima oleh pimpinan Kerapatan Adat Nagari Bayang nan Tujuh Koto, Dt. Setia Penghulu Pucuak bulek urek tunggang Bayang nan Tujuh Koto dan Pimpinan Kerapatan Adat Nagari Koto nan Salapan, Datuk Bagindo Basa di Puluik-Puluik. Dalam tambo itu, tersebutlah bahwa

Keterangan pertama :

Sebagaimana keterangan yang diperilapat dan dikumpulkan dalam kedua persidangan ini menurut sepanjang waris nan ditolong pusako nan dijawek dari ninik mereka yang terdahulu dari padanya yakni :

Yaitu persoalan penduduk :

Penduduknya orang yang berpangkat sepanjang adat adalah berasal dari Nagari Koto nan Tigo (Kubung Tigo Belas di Darek). Kinari, Muaro Paneh, Koto Anau, dari sinilah turunnya ninik mereka atau penduduk yang sekarang ini.

Mula-mula ninik turun ke Bayang ini, menurut sepanjang waris nan ditolong pusako nan dijawek dari ninik mereka yang terdahulu, atau kato nan diterima dari urang tuo-tuo dan penghulu-penghulu na tertuo dalam Nagari Bayang ini adalah sejarahnya sebagai berikut di bawah ini :

- a. Mereka turun kepada kedua Nagari ini atau Nagari Bayang Nan Tujuh Koto dan Nagari Koto Nan Salapan dengan penduduknya saparinduan laki-laki perempuan serta penghulunya dan turut orang-orang tuo-tuonyo juga Malin nan Barampek ke Koto na Salapan dan ke Bayang nan Tujuh Koto.*

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewar, Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir

tidak berperan lagi. Dan kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus merubah pemerintahan Nagari Tanjung Durian.

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa.

Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Dan pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara

bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan undang undang UU No 22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang berasal dari Jawa dan cenderung feodalistis, sentralis-vertikal-topdown, sistem pemerintahan nagari di Minangkabau bercirikan egaliter, mandiri, dan lebih berorientasi ke masyarakat (kerakyatan). Oleh sebab itu, ketika bergulirnya reformasi antara lain ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lazim dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah, rakyat Sumatera Barat dengan penuh antusias mencanangkan "kembali ke sistem pemerintahan Nagari".

Pencanangan "kembali ke sistem pemerintahan Nagari" dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda no 9 tahun 2009 tersebut, kemudian diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Sebagai tindak-lanjutnya, hampir semua Daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat telah pula menerbitkan Perda yang mengatur secara lebih rinci hal-hwal Pemerintahan Nagari di kabupaten/ kota masing-masing.

Dengan diberlakukannya undang-undang pemerintah daerah maka di Sumatera Barat sampai sekarang menjalankan sistem kenagarian pada

tingkat terendah pemerintahan Pencanangan kembali ke sistem pemerintahan nagari, yang secara bersamaan juga diikuti oleh semangat kembali ke adat dan ke surau, mencerminkan adanya kemauan politik (political will) yang kuat untuk memberdayakan kembali nagari sebagai "republik-republik kecil" yang sifatnya self-contained, otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Langkah ini diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat nagari yang adil dan makmur (sejahtera), berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang berakar pada tradisi budaya dan adat istiadat setempat (adat salingka nagari, Cupak salingka batuang). Permasalahannya ialah, seberapa jauh harapan tersebut mampu diwujudkan dalam kenyataan.

Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari. Hal disikapi secara arif dan bijaksana masyarakat Nagari Tanjung Durian yang pada saat itu masih terdiri dari 3 (dusun). Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diberi tugas dan tanggung jawab memilih Pjs. Wali Nagari Tanjung Durian yang dipilih pada tanggal 21 Maret 2011, melalui musyawarah Anak Nagari Tanjung Durian baik yang berada di Kampung halaman atau di Perantauan.

Tugas selanjutnya adalah pemilihan dan pembentukan lembaga Nagari yang merupakan mitra kerja Pemerintahan Nagari dalam menindaklanjuti program Pembangunan di Nagari seperti Dewan Perwakilan Nagari (DPN) dan Badan Musyawarah Adat dan Syara Nagari Tanjung Durian, serta pemilihan Wali Nagari Definitif. Berkat kebersamaan dan jiwa kembali ke Nagari yang kuat melalui panitia pemilihan, terpilih 9 (sembilan) orang anggota Dewan Perwakilan Nagari dan 5 (lima) orang anggota Badan Musyawarah Adat dan Syara' yang terdiri dari unsur unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat/Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Nagari, proses pemilihan Wali Nagari, setelah melalui proses penyaringan, seleksi administrasi, penyampaian visi dan misi serta pemilihan langsung oleh masyarakat yang

dilaksanakan pada hari KAMIS Tanggal, 08 MEI 2018. Pemilihan ini merupakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) yang Kedua setelah pasca perubahan sistem pemerintahan di lingkup kecamatan Bayang Propinsi Sumatera Barat dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari. Wali Nagari yang terpilih adalah **E D I S O N**. Pelantikan Wali Nagari Tanjung Durian Definitif dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 di GOR Zet Nizen Pannan.

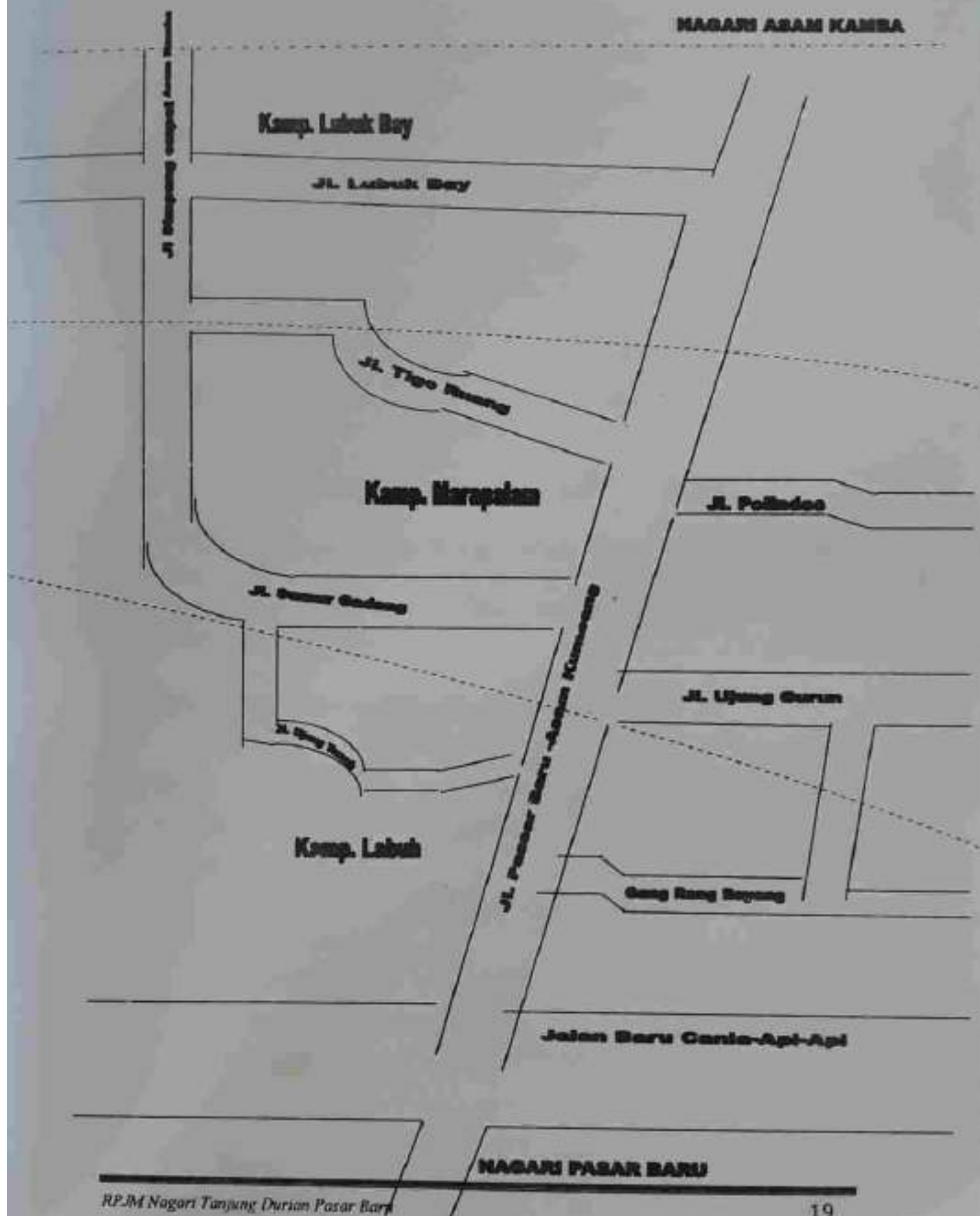
Sesuai peraturan yang berlaku, bahwa Pemerintah Nagari harus didukung oleh Lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat Nagari, sehingga Pemerintah Nagari Tanjung Durian juga membentuk lembaga lembaga pendukung tersebut seperti PKK (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga), LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari), BKM (Bundo Kanduang), BKMT (Badan Kontak Majelis Taqlim), Pemuda Nagari, Karang Taruna Nagari serta lembaga mitra lainnya baik yang berada di Nagari Tanjung Durian maupun yang menetap di perantauan. Lembaga inilah nantinya yang akan menjadi penjabar tugas tugas dan kewenangan yang telah diatur oleh Pemerintah yang lebih tinggi dengan tanggungjawab kegiatan bersama Wali Nagari.

Pada bulan tahun 2011, keluar Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2011 tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari dan Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Tanjung Durian, termasuk salah satu Nagari yang dimekarkan menjadi 3 (Kampung) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Kampung Labuh
2. Kampung Marapalam
3. Kampung Lubuk Bay

2.2 Peta dan Kondisi Nagari

2.2.1 Peta Sosial Nagari Tanjung Durian Pasar Baru



2.2.2 Kondisi Nagari

2.2.2.1 Kondisi Geografis Nagari Tanjung Durian

Secara umum potensi Nagari Tanjung Durian adalah pertanian.

Berhubung letak Nagari Tanjung Durian Empat persegi Secara umum keadaan topografi Nagari Tanjung Durian merupakan daerah dataran rendah, sedangkan iklim secara umum mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Tanjung Durian, Kecamatan Bayang.

Secara administratif, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru terletak di wilayah Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

*Utara berbatasan dengan Nagari Asam Kamba,
Barat berbatasan dengan Nagari Api-Api,
Selatan berbatasan dengan Nagari Pasar Baru,
Timur berbatasan dengan Nagari Gurun Panjang Barat.*

Jarak tempuh Nagari Tanjung Durian Pasar Baru ke kecamatan adalah $\pm$ 01 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1/2 jam.

2.2.2.2 Demografi Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Nagari tahun 2017, jumlah penduduk Tanjung Durian Pasar Baru adalah terdiri dari 562 KK, dengan jumlah total 2.327 jiwa, dengan rincian 1.176 laki-laki dan 1.151 perempuan.

Jumlah penduduk Desa Tanjung Durian per Desember 2017 adalah 2.327 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki – laki : 1.176 jiwa
- b. Perempuan : 1.151 jiwa
- c. Jumlah KK : 562 KK

Tanjung Durian merupakan 1 (satu) dari 3 (tiga) Kampung yang ada di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pasca pemekaran Nagari tahun 2011. Sebelumnya Nagari Tanjung Durian terdiri atas (Tiga) Dusun diantaranya Dusun I Labuh, Dusun II Marapalam, Dusun III Simpang Empat. Setelah dimekarkan, Menjadi 3 (tiga) kampung saja yaitu : Kampung Labuh, Kampung Marapalam dan Kampung Lubuk Bay.

Ibu Nagari Tanjung Durian berjarak $\pm$ 01 km dari Ibu Kecamatan dan $\pm$ 13 km dari Kota Kabupaten.

Adapun luas wilayah Nagari Tanjung Durian Menurut Kampung. Masing penggunaannya adalah:

Uraian	KAMPUNG			Ket.
	Kamp.Labuh	Kamp.Marapalam	Kamp.Lbk Bay	
Luas wilayah	55 ha	68 ha	61 ha	184 ha
Tanah perkarangan/perumahan	-	-	-	-
Kawasan pertanian seluas	45 ha	30 ha	25 ha	100 ha
Kawasan perkebunan	-	-	-	-
Kawasan pemukiman penduduk	18 ha	19 ha	25 ha	62 ha
Kawasan lahan rawa lebak	-	-	-	-
Kawasan hutan rakyat	-	-	-	-
Kawasan lain-lain	6 ha	7 ha	9 ha	22 ha

2.2.2.3 Keadaan Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru dapat dilihat dari angkatan kerja yang ada. Dari keseluruhan penduduk, pekerjaan yang paling banyak ditekuni penduduk Nagari Tanjung Durian Pasar Baru adalah dibidang pertanian sebanyak 359 jiwa. Di ikuti oleh pedagang kecil sebanyak 72 jiwa. PNS 27 jiwa. Tukang jahit 1 orang, Peternak 5 jiwa jiwa, TNI/Pensiunan 9 jiwa.

Indikator lain yang digunakan dalam dokumen ini dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keberadaan KK Miskin. Data tahun 2017 jumlah KK miskin yang ada di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru sebanyak 204 KK. Mengenai ketersediaan data tersebut perlu dilakukan pendataan ulang.

2.2.2.4 Keadaan Sosial

Adapun keadaan sosial Nagari Tanjung Durian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Kondisi Sosial Nagari

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kependudukan :		
	A. Jumlah Penduduk (jiwa)	2.327	
	B. Jumlah KK	562	
	C. Jumlah Laki-Laki :	1.176	
	▪ 0 – 15 tahun	346	
	▪ 16 – 55 tahun	698	
	▪ Diatas 55 tahun	132	
	D. Jumlah Perempuan :	1.151	
	▪ 0 – 15 tahun	287	
	▪ 16 – 55 tahun	755	
	▪ Diatas 55 tahun	109	
2	Kesejahteraan Sosial :		
	A. Jumlah KK Kaya	67	
	B. Jumlah KK Sedang	291	
	C. Jumlah KK Miskin	204	
3	Tingkat Pendidikan :		
	A. Tidak Tamat SD	245	
	B. SD	677	

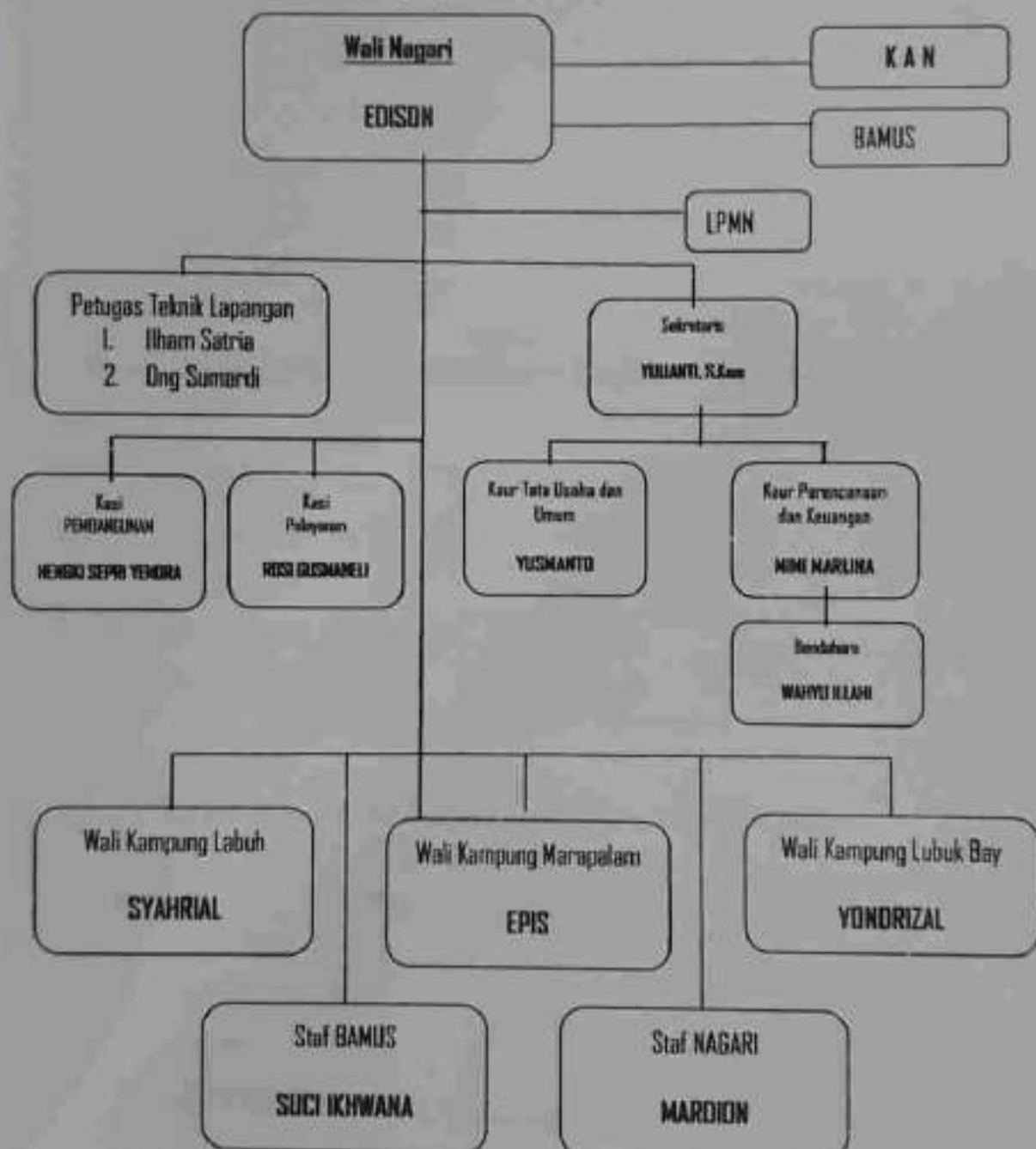
	C. SLTP	479	
	D. SLTA	790	
	E. Diploma/Srta S1 (sarjana)	136	
4	Mata Pencarian :		
	A. Buruh Tani	193	
	B. Petani	166	
	C. Peternak	5	
	D. Pedagang	72	
	E. Tukang Kayu	0.000	
	F. Tukang Batu	0.000	
	G. Penjahit	1	
	H. PNS	27	
	I. Pensiunan	5	
	J. TNI/POLRI	4	
	K. Perangkat Nagari	11	
	L. Pengrajin	-	
	M. Industri Kecil	0.000	
	N. Buruh Industri	0.000	
	O. Lain-lain	0.000	
5	Agama :		
	A. Islam	2.327	
	B. Kristen	-	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

2.3 Kelembagaan Nagari

2.3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Sebagai sebuah Nagari, sudah tentu struktur kepemimpinan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru**



Tabel
Nama Pejabat Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

No	Nama	Jabatan
1	EDISON	Wali Nagari
2	YULIANTI, S.Kom	Sekretaris Nagari
3	HENGKI SEPRI YENDRA	Kasi Pemerintahan
4	ROSI GUSMANELI	Kasi Pelayanan
5	YUSMANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	MIMI MARLINA	Kaur Perencanaan dan Keuangan
7	WAHYU ILLAHI	Bendahara
8	SYAHRIAL	Kepala Kampung Labuh
9	EPIS	Kepala Kampung Marapalam
10	YONDRIZAL	Kepala Kampung Lubuk Bay
11	MARDION	Staf Nagari
12	SUCI IKHWANA	Staf BAMUS

Tabel
Nama Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

No	Nama	Jabatan
1	HARDIMEN, S.Pd.I	Ketua Bamus
2	ADNAN Pnk Rj. Gamuyang	Wakil Ketua
3	PISMAYENI	Sekretaris
4	SUARDI HT. Dt. Rj. Intan	Anggota
5	DIAN MARDIAN	Anggota

Tabel
Nama-nama LPMN Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

No	Nama	Jabatan
1	MEKROZA	Ketua
2	ILHAM SATRIA	Wakil Ketua. 1
3	INDRA	Wakil Ketua. 2
4	WALDEMAR	Sekretaris

5	YURNINGSIH	Bendahara
---	------------	-----------

Tabel
Tim Penggerak PKK Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

No	Nama	Jabatan
1	YENTI MARNI	Ketua
2	UNDRIANI	Wakil Ketua
3	WATI	Sekretaris I
4	HENI DEFITA	Bendahara
5	SUSMITA	Ketua Pokja I
6	YARNELI	Ketua Pokja II
7	MARNI	Ketua Pokja III

Secara umum pelayanan pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.3.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI

A. WALI NAGARI

Wali Nagari berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Bamus.

Tugas Wali Nagari adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Wewenang Wali Nagari :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamus;
- b. mengajukan rancangan peraturan Nagari;
- c. menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama Bamus;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamus;

- e. membina kehidupan masyarakat Nagari;
- f. membina perekonomian Nagari;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Wali Nagari adalah :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Nagari;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Nagari yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

- p. melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan

Larangan Wali Nagari

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota Bamus atau lembaga kemasyarakatan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD,
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan

B. PERANGKAT NAGARI

SEKRETARIAT NAGARI

1. Sekretariat Nagari berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Nagari yang dipimpin Sekretaris Nagari.
2. Sekretaris Nagari mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
3. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan,
 - b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pertanahan/keagrariaan dan kependudukan,
 - c. Pelaksanaan administrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Nagari sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Nagari dibantu oleh:

- (1) Kasi Pemerintahan
- (2) Kasi Pelayanan
- (3) Kepala urusan Tata Usaha dan Umum
- (4) Kepala urusan Perencanaan dan Keuangan, dan
- (5) Bendahara

KEPALA KAMPUNG

- o Kepala Kampung adalah sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya.
- o Kepala Kampung mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari di wilayah kerjanya.
- Fungsi Kepala Kampung mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Nagari di wilayah kerjanya ;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Nagari sesuai bidang tugasnya

2.4 Dinamika Konflik

Analisis konflik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggali informasi tentang perubahan sosial masyarakat Nagari, dinamika konflik, tingkat kohesi sosial, harmonisasi antar pemangku kepentingan dan ketahanan masyarakat dalam mengelola konflik. Analisis konflik dilaksanakan untuk melengkapi kajian Nagari secara cepat (potret Nagari, peta potensi Nagari dan bagan kelembagaan) yang akan menjadi masukan

dalam merumuskan isu strategis dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. Hasil kajian ini untuk memastikan sejauhmana perencanaan yang dibuat benar-benar peka terhadap konflik dengan mempelajari pola interaksi antar kelompok (relasional dan struktural), perbedaan nilai (kultural), isu-isu ketidakadilan, penolakan, kesenjangan, penyalahgunaan wewenang, dan pola pengelolaan sumber daya.

2.4.1 Pengertian

Dinamika konflik merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan, pola intensitas, dan karakter nagari meliputi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan di Nagari yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan upaya bina damai. Kajian dinamika konflik adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan nagari atau kelurahan yang meliputi pemahaman konteks, interaksi, intervensi, pelaku, masalah dalam rangka perencanaan pembangunan dan bina damai.

2.4.2 Tujuan

Kajian terhadap dinamika konflik dalam penyusunan RPJM Nagari dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pola kekuatan hubungan antar kelompok, kerentanan sosial, kohesivitas kelompok, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat perdamaian di nagari sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. Secara khusus kegiatan ini bertujuan :

- Mengidentifikasi kekuatan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di nagari
- Mengidentifikasi kondisi sosial yang menyebabkan kesenjangan diantara kelompok atau antar pemangku kepentingan di nagari.
- Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemecah perdamaian dalam masyarakat; dan

- Merumuskan strategi penanganan dan pencegahan konflik serta bina damai ke depan secara terpadu.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

- Partisipatif : proses pembangunan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari tingkat Nagari/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga nasional.
- Inklusif : perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak membedakan suku, ras, dan agama. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak layanan dasar. RPJM Desa bukan menjadi milik salah satu kelompok atau golongan saja.
- Netralitas (impartial): Tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, aktor atau isu dalam upaya penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi di nagari.
- Transparansi ; terbuka dan memberikan kemudahan dan akses kepada semua pihak untuk dapat memahami dan terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- Menghormati kepemilikan masyarakat ; Setiap hak yang menjadi milik masyarakat harus dihormati dan dilindungi terutama bagi masyarakat rentan dan menderita akibat korban konflik.
- Akuntabilitas ; bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan berkaitan fungsi dan kedudukan para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan nagari.
- Kemitraan dan koordinasi , Seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan didasarkan pada pemahaman, keterpaduan dan kerjasama positif berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJM Nagari.
- Koherensi dan saling melengkapi ; Setiap pemangku kepentingan akan berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Setiap elemen akan

saling berkaitan dan masing-masing memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian masalah dan bina damai.

- Ketepatan waktu, RPJM Nagari dapat diselesaikan tepat waktu sesuai alur dan mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan konflik baru yang sulit untuk diselesaikan.
- Berkeadilan, RPJM Nagari harus mengalokasikan sumber dana dan distribusi sumber daya dengan memberikan kesempatan yang seimbang (distributional equity) antarkelompok dan antar kampung, tidak menimbulkan kesenjangan dan tepat sasaran.

2.5 Masalah dan Potensi

2.5.1. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbang Nagari, penyusunan RPJM Nagari Tanjung Durian Pasar Baru yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan Nagari yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Berdasarkan Hasil Pengkajian keadaan desa diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Kelembagaan

Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan Nagari berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Kelembagaan tergambar sebagai berikut :

- 1) Besar kecil gambar lingkaran menggambarkan Lembaga yang ada,
- 2) Sedangkan jarak lingkaran dengan lingkaran warga menggambarkan pengaruh maupun interaksi Lembaga tersebut dengan warga

B. Diagram Musim

Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan Nagari berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar sebagai berikut .

- 1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
- 2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut

2.5.2. Potensi

Nagari Tanjung Durian Pasa Baru memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

2.5.2.1.Sumber Daya Alam

Nagari Tanjung Durian Pasar Baru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Antara lain :

- a. Lahan pertanian (sawah) seluas 100 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal, dikarenakan kurangnya kretifitas para petani.
- b. Tersedianya pakan ternak yang melimpah untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, tetapi sampai saat ini belum bisa diolah secara maksimal.

- c. Banyaknya kotoran ternak sapi, ayam dan kambing, memungkinkan untuk digunakan sebagai biogas dan limbahnya untuk pembuatan pupuk organik.
- d. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan sawah dan tegalan yang belum dapat diolah menjadi barang siap jual.
- e. Adanya potensi sumber air yang bisa dikembangkan untuk usaha pengairan sawah.
- f. Banyaknya tanaman sayuran pada musim kemarau dan hanya dijual kepasar belum dapat mengolahnya.

2.5.2.2.Sumber Daya Manusia

- a. Kehidupan warga masyarakat masih kental dengan adat istiadat dan aman.
- b. Besarnya penduduk usia produktif disertai SDM yang baik.
- c. Terpeliharanya budaya musyawarah di desa dalam penyelesaian permasalahan.
- d. Cukup tingginya partisipasi gotong royong dalam pembangunan desa.
- e. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif tetapi kebanyakan tidak dipergunakan secara aktif.
- f. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- g. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga perlu peningkatan.
- h. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap Karipung.
- i. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.
- j. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan makanan ringan.
- k. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan anyaman dan pemanfaatan limbah lainnya.

2.5.2.3.Kelembagaan / Organisasi

- a Hubungan yang baik antara wali Nagari, perangkat Nagari, lembaga Nagari dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- b Adanya lembaga di tingkat Nagari, yaitu Pemerintah Nagari, LPMN dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- c Adanya kelompok-kelompok di Nagari seperti kelompok tani, Gapoktan, PKK, dan kelompok Majelis Ta'lim.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1 Pengkajian Nagari

3.1.1 Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Sketsa Nagari

Adapun pengkajian keadaan Nagari dengan menggunakan metode sketsa Nagari dapat dilihat pada tabel berikut.

1	Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum layak huni	Lahan ada,	Nagari
2	Pagar Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	Lahan ada	Nagari
3	Tempat Parkir Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	Lahan ada	Nagari
4	Pos Pemuda/Pos Ronda dan perlengkapannya belum memadai	Lokasi ada	Nagari
1.	Honor Pengajar (PAUD/MDA/TPA/TPSA/Guru Irama Al-Qur'an) belum memadai	Guru ada ,murid ada	Nagari
2.	Kurangnya buku bacaan PAUD	Anak usia sekolah banyak, keinginan belajar kuat	Nagari
3.	Belum adanya Pelatihan Pembacaan Khutbah bagi Anak-ana dan remaja	Keinginan belajar tinggi	Nagari
4.	Gedung PAUD/ TK masih menumpang pada rumah warga	Murid ada, tenaga guru ada	Nagari
5.	Gedung MDA masjid Nurul Yaqin terbengkalai dan Mobiler tidak ada	Murid banyak, lokasi ada, tenaga dan material ada	Lubuk Bay
6.	Mobiler SDN 19 Tanjung Durian banyak yang kurang	Lokasi ada, murid ada	Nagari
7.	Pelatih Randai belum disejahterakan	Guru ada ,murid ada	Nagari
8.	Kesenian tradisional randai, talempong, tari-tarian tidak dikenali dan dikuasai oleh generasi muda.	Budaya luhur dari nenek moyang, masih ada yang bisa mengajarkan kepada gererasi penerus	Nagari
9.	Pengadaan Alat-alat kesenian tradisional seperti talempong dan alat-alat kesenian randai lainnya masih tidak layak pakai	Sanggar ada, pelatih ada, anak didik ada	Nagari
10.	Pengadaan Pakaian tari masih kurang	Sanggar ada, pelatih ada, anak didik ada	Nagari

11	Pelatihan Adat dan Budaya Minang belum ada	Minat masyarakat ada	Nagari
12	Kegiatan kesenian anak nagari kurang diminati	Sanggar seni ada, anak-anak ada	Nagari
13	Banyak Murid RTM yang berprestasi, pembagian beasiswa RTM Tidak Merata	Murid Golongan RTM ada, mahasiswa ada	Nagari
14	Belum adanya Pagar SDN 19 Tanjung Durian yang Permanen	Lahan ada, murid ada	Lubuk Bay
15	Masih ada balita, Ibu hamil, dan lansia yang konsumsi gizinya kurang memadai	Balita, ibu hamil dan lansia selalu ada, pengetahuan tentang gizi tidak merata pada masyarakat	Nagari
16	Masih banyak anak RTM kurang gizi	Anak kurang gizi ada	Nagari
17	Belum adanya program kegiatan untuk Lansia dan pemberian makan tambahan.	Lansia ada	Nagari
18	Kurangnya kesejahteraan Kader Posyandu	Kegiatan ada	Nagari
19	Belum ada Pakaian seragam bagi kader-kader	Kader-kader ada	Nagari
20	Kegiatan posyandu kurang menarik minat masyarakat.	Kader yandu ada, kegiatan yandu ada, peserta yandu ada.	Nagari
21	Belum adanya kesejahteraan Kader KB, Nagari Siaga, PTM dan Puskel	Kader ada, kegiatan ada	Nagari
22	Tempat Posyandu yang layak tiap Kampung belum ada	Kegiatan yandu aktif tiap bulan	Nagari
23	Peralatan kesehatan Poskesri kurang memadai	Poskesri ada, Bidan desa ada, pasien banyak	Nagari
24	Belum ada Alat-alat penimbangan yang layak di Posyandu	Kegiatan yandu ada, balita ada	Nagari
25	Untuk mendukung program Germas perlu diberikan Tutor Germas	Masyarakat ada	
26	Biaya untuk berobat bagi masyarakat terasa berat. Masih ada RTM yang belum punya kartu BPJS / KIS.	RTM ada, Layanan BPJS/KIS ada dari pemerintah	Nagari
27	Masih ada RTM belum mendapat bantuan PKH	Golongan RTM ada	Nagari
28	Belum adanya Jalan lingkar ujung tanah menuju kuburan	Lahan ada, warga ada	Labuh
29	Jalan usaha tani di belakang Gang Rang Bayang ke perumahan belum ada, biaya produksi tinggi	Lahan ada, warga ada	Labuh
30	Ketika hujan Jalan Samping Rumah si Nas ke Jalan Baru selalu becek	Pengerasan sudah ada	Labuh
31	Belum adanya Jalan depan Gang Rang	Lahan ada	Labuh

	Bayang ke Jalan Baru		
32.	Jalur alternatif ke SMA 2 terlalu jauh	Lahan ada, jalur alternatif	Marapalam
33.	Jalan tigo ruang sampai ke Kantor Wali Nagari banyak yang berlobang	Pengerasan sudah ada	Marapalam
34.	Jalan dari Tigo ruang ke Subarang sawah belum ada	Lahan ada, warga ada	Marapalam
35.	Jalan yang sudah banyak berlobang, perlu Rehabilitasi jalan ujung gurun I	Lahan ada	Marapalam
36.	Jalan dari Simpang Cania sampai ke Jembatan Api-Api sering becek ketika hujan.	Lahan ada	Labuh
37.	Bahu jalan belum ada	Lokasi ada	Marapalam
38.	Jalan dari rumah Meri sampai rumah Da Man Kopi sering becek ketika hujan.	Lahan ada	Lubuk Bay
39.	Jalan selalu becek ketika hujan dan air selalu tergenang	Lokasi ada	Lubuk Bay
40.	Jalan Rumah Sawah sampai ke SD 19 (Jalan lingkar rumah sawah) belum ada	Lahan ada, warga ada	Lubuk bay
41.	Belum adanya jalan dari SDN 19 ke Lubuk Batu	Lahan ada, warga ada	Lubuk bay
42.	Untuk membuka jalur evakuasi Stunami dari Lubuk Bay ke Bukit Tuajung	Lahan ada	Lubuk bay
43.	Shalter di Nagari belum ada	Lokasi ada	Nagari
44.	Rehabilitasi Bronjong Jalan Ujung Grun I	Lokasi ada, Pemuda banyak	Marapalam
45.	Batang bayang Selalu mengancam Rumah Warga di kala Hujan ,sehingga Tanah pemukiman Terjun kedalam batang Air	Lokasi ada, Pemuda banyak	Lubuk Bay
46.	Kegiatan rapat-rapat dan lain-lain belum ada tempat yang memadai	Kegiatan rapat/ pertemuan banyak	Nagari
47.	Gapura Masjid Al-Kasyaf belum ada	Lokasi ada	Lubuk Bay
48.	Sering terjadi longsor tanah pemukiman warga di waktu air meluap yang mengancam pemukiman warga.	Rumah-rumah sudah ada sejak lama.	Lubuk Bay
49.	Jalan dari IB imunisasi sampai Asam Kambia belum ada saluran draenase, ketika hujan air selalu tergenang	Lokasi ada	Nagari
50.	Ketika musim hujan aliran air tidak lancar, perlu dibangun irigasi dari PNPM ke Jalan baru Taluk Lokan	Lahan ada	Labuh
51.	Musim penghujan tali bandar dari Tanah sarik (Rawang) ke Jalan baru tidak lancar.	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Labuh

52	Saluran air dari ujung tanah ke mushala tidak lancar	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Labuh
53	Diwaktu Hujan selalu air menggenangi pemukiman Warga karena tidak adanya Saluran Drainase kiri kanan dari Buah Kubang ke SDN 19	Lahan ada	Lubuk Bay
54	Ketika hujan air selalu menggenangi rumah warga, karena belum adanya drainase Ujung Gurun	Lokasi ada	Marapalam
55	air yang selalu tergenang ketika hujan perlu dibangun Irigasi permanen dari simpang empat ke Ujung Tanah	Lahan ada	Lubuk Bay
56	Air tidak lancar ketika hujan sering tersumbat, perlu dibangun irigasi dari simpang buah kubang ke subarang sawah	Lokasi ada	Lubuk Bay
57	Sambungan Irigasi dari Cucian ke Bariyang tidak lancar, ketika hujan air sering tergenang	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Marapalam
58	Setiap kali hujan deras air selalu tergenang, perlu dibangun Drainase jalan sumur gadang	Lahan ada, lokasi mengizinkan	Marapalam
59	Pos Pemuda/Pos Ronda dan perlengkapannya belum ada	Lokasi ada	Nagari
60	Perlengkapan alat-alat kematian/jenazah (Tenda, Diesel, Keranda, Tempat pemandian Jenazah, Gunting, Baskom, Kursi, dll) belum lengkap	Masyarakat ada	Nagari
61	Penerangan / Lampu Jalan Nagari belum memadai	Lokasi ada	Nagari
62	Masih ada Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat ada, RTLH ada	Nagari
63	Masih banyak RTM yang belum memiliki MCK	Lokasi ada, masyarakat miskin ada	Nagari
64	Bantuan Pompa Air bersih belum ada	Penerima manfaat ada	
65	Belum adanya Penyediaan tempat sampah	Sampah ada	Nagari
66	Sanitasi lingkungan kurang memadai	Lahan ada	Nagari
67	Belum ada saluran drainase keliling kampung, aliran air tidak lancar ketika hujan, banyak terjadi genangan air	Lahan ada	Nagari
68	Pengadaan alat Pemisah sampah belum ada		Nagari
69	Tidak ada tanaman nagari nan asri sebagai tempat bermain anak-anak dan berolahraga	Bisa menjadi tempat kegiatan olahraga, silaturahmi antar warga	Nagari

70	Posluhan Kelompok Tani belum ada	Kelompok tani ada	Nagari
71	Pengetahuan pola perkebunan sangat kurang, perlu adanya pelatihan	Lahan luas, tani merupakan usaha utama mayoritas masyarakat	Nagari
72	Petugas penyuluh jarang melakukan pembinaan kepada petani, perlu adanya pembinaan dari PPL Pertanian	Masyarakat tani ada	Nagari
73	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang	Lahan ada, petani ada	Nagari
74	Tidak adanya bantuan Bibit tanaman perkebunan dari Pemerintah	Lahan ada, petani ada	Nagari
1.	Kelembagaan LPMN tentang menggali kurangnya potensi nagari	Peran dan fungsinya sangat penting, tempat dan media ada.	Nagari
2.	Belum adanya solusi dalam penanggulangan bencana alam karena belum ada pelatihan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Nagari
3.	Event Budaya Tahunan (Kegiatan Festival Randai) belum ada	Sanggar seni ada	Nagari
4.	Baju Datuk dan Perangkatnya belum lengkap	Kegiatan ada	Nagari
5.	Kurangnya dana dalam rangka memperingati 17 Agustus	Kegiatan Ada	Nagari
6.	Kurangnya dana bantuan dalam kegiatan MTQ tingkat Kampung	Kegiatan ada	Nagari
7.	Anak-anak muda makin marak mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak mental generasi muda, Perlu pembinaan untuk generasi muda	Pemuda masih punya masa depan yang panjang, generasi penerus bangsa	Naagari
8.	Budaya gotong royong sudah mulai luntur	Budaya luhur dari nenek moyang	Nagari
9.	Pelatihan kewirausahaan Pemuda belum ada	Kelompok pemuda ada	Nagari
10.	Sarana/Lapangan Olahraga Folly, Takrau, Badminton dan Futsal belum memadai	Lapangan ada	Nagari
11.	Sarana dan prasarana Olahraga kurang memadai	Minat masyarakat tinggi, Lokasi ada	Nagari
12.	Lapangan Tennis Meja belum ada	Lokasi ada, Pemuda banyak	Nagari
13.	Belum adanya lapangan futsal	Lokasi ada, Pemuda banyak	Nagari
14.	Pengetahuan adat budaya Minangkabau semakin dilupakan, pimpinan adat banyak yang tidak menguasai secara utuh adat dan	Kearifan lokal yang sudah terbentuk dari masa lalu, Budaya luhur dari nenek	Nagari

	budaya Minang	monyang	
15.	Kurang efektifnya PKK dalam nagari	Peran dan fungsi PKK sangat penting, tempat dan media ada	Nagari
16.	Bantuan PHBI perlu ditingkatkan	Kegiatan ada	Nagari
17.	Bantuan PHBN perlu ditingkatkan	Kegiatan ada	Nagari
18.	Kesejahteraan Honor Imam dan Garin Masjid belum memadai	Imam ada	Nagari
19.	Tidak adanya Transport Guru/Ustad untuk kegiatan Majelis ta'lim tiap kampung	Majelis ta'lim ada	Nagari
20.	Alat-Alat Kesenian untuk Majelis Ta'lim belum lengkap	Majelis ta'lim aktif	Nagari
21.	Prasarana masjid dan mushalla masih banyak yang kurang	Kegiatan ada	Nagari
1.	Masyarakat sulit mendapatkan Bantuan Keramba, bibit ikan dan udang dari Pemerintah	Penampung ada	Nagari
2.	Bantuan Mesin Bajak Sawah belum memadai	Penerima manfaat ada	Nagari
3.	Bantuan Mesin Perontok Padi belum ada	Penerima manfaat ada	Nagari
4.	Sulitnya masyarakat mendapat Bantuan Benih padi unggul	Lahan pertanian luas	Nagari
5.	Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu adanya bantuan Pupuk Bersubsidi dari pemerintah	Lahan pertanian luas	Nagari
6.	Belum adanya pelatihan Penanaman cabe bagi kelompok tani	Kelompok tani ada, lahan ada	Nagari
7.	Pelatihan Penanaman padi Salibu belum diberikan kepada kelompok tani	Kelompok tani ada, lahan ada	Nagari
8.	Untuk meningkatkan produksi yang lebih baik diperlukan pelatihan tanam Jagung	Kelompok tani ada, lahan ada	Nagari
9.	sulitnya masyarakat mendapatkan ternak bantuan dari Pemerintah (Sapi Unggul), sehingga masyarakat hanya memelihara ternak masyarakat	Penampung ada	Nagari
10.	Masyarakat sulit mendapatkan bantuan Pengembangan dan pengelolaan Itik	Penampung ada	Nagari
11.	Masyarakat sulit mendapatkan Bantuan Pengembangan dan pengelolaan Ayam pedaging	Penampung ada	Nagari

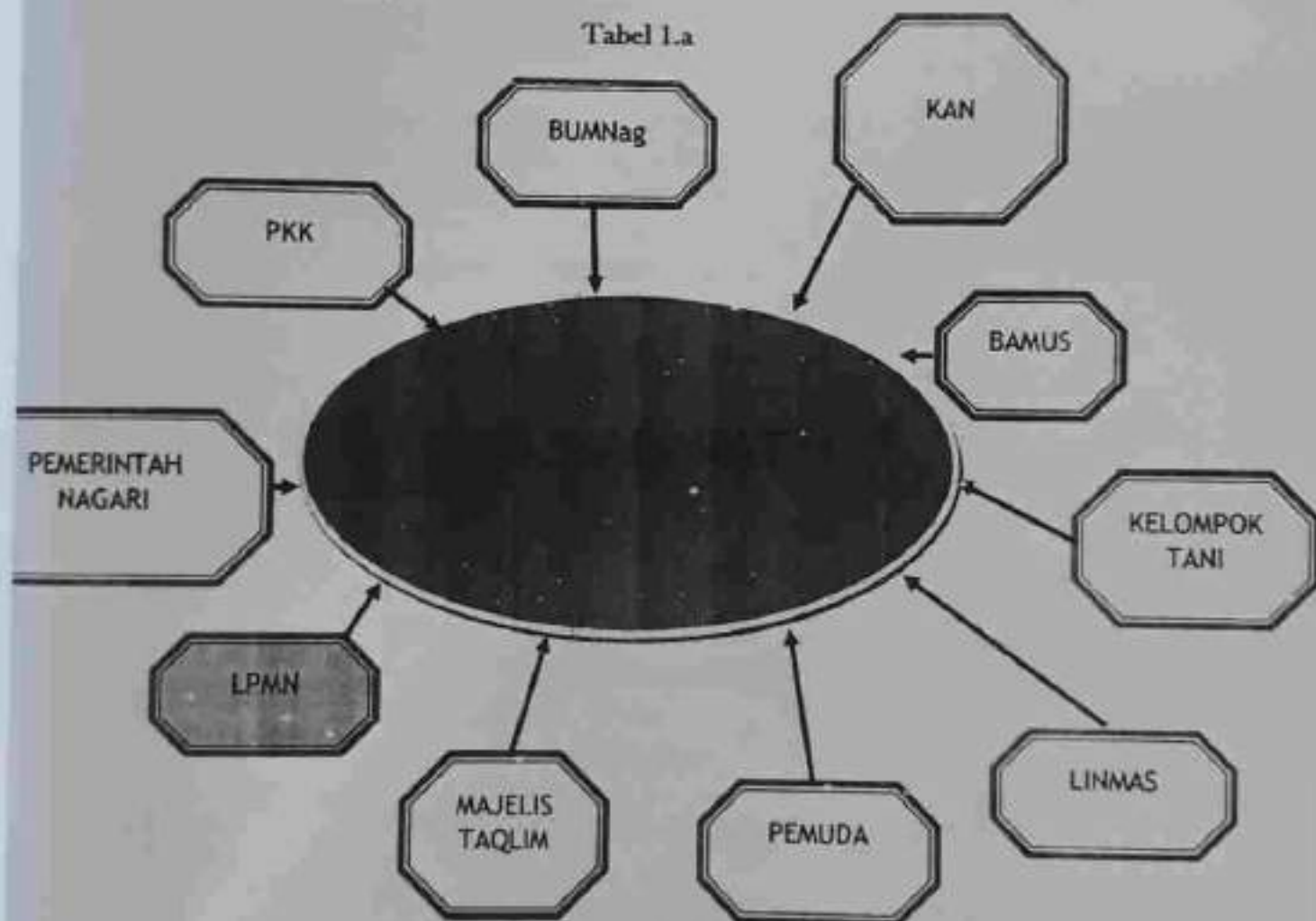
12	Belum ada pelatihan kelompok tani dalam pengolahan keramba ikan	Kelompok tani ada	Nagari
13	Belum ada pelatihan budidaya ikan air tawar	Kelompok tani ada	Nagari
14	Pengetahuan pola pertanian kurang dipahami, produksi masih kurang	Meningkatkan hasil pertanian	Nagari
15	Jerami banyak dibakar petani setelah panen, tidak termanfaatkan dengan optimal perlu adanya pelatihan untuk kelompok tani	Kelompok tani ada	Nagari
16	Pengetahuan petani tentang pertanian organik sangat kurang	minat kelompok tani tinggi	Nagari
17	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang, perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian	minat kelompok tani tinggi	Nagari
18	Lahan-lahan sekitar taluk lokan masih banyak belum digarap	Lahan produktif di sekitar taluk lokan	
19	Sering Ternak Masyarakat diserang penyakit, perlu adanya bantuan pakan dan obat-obatan untuk ternak	Penampung ada	Nagari
20	Pengetahuan pola pertanian ramah lingkungan, efektif dan produksi masih kurang	Lahan ada	Nagari
21	Penyuluhan Pertanian kurang terserap baik oleh masyarakat, dan petugas penyuluh pertanian jarang melakukan pembinaan kepada petani. Perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian	minat kelompok tani tinggi	Nagari
22	Kelompok diskusi tentang pertanian tidak ada	Meningkatkan skill petani	Nagari
23	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat	Meningkatkan kapasitas perangkat	Nagari
24	Belum adanya Produk Hukum yang dihasilkan Bamus perlu Pelatihan Bamus	Meningkatkan kapasitas Bamus	Nagari
25	Belum adanya Pelatihan Sepeda Motor, Elektronik, perabot bagi pemuda	Pemuda ada, minat ada	Nagari
26	Kurangnya pelatihan Sulaman Bayangan dan Sekolah Kecantikan bagi Ibu-ibu	Kelompok ibu-ibu ada, minat ada	Nagari
27	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos belum ada	Bahan baku ada, masyarakat ada	Nagari
28	Pelatihan Pengolahan Batok Kelapa belum ada	Bahan baku ada, masyarakat ada	Nagari

29	Pelatihan Pembuatan Gasing belum ada	Bahan baku ada, masyarakat ada	Nagari
30	Pelatihan Pembuatan Tengkulak atau Saluak belum ada	Bahan baku ada, masyarakat ada	Nagari
31	Pelatihan Pengolahan Limbah Organik belum ada	Bahan baku ada, masyarakat ada	Nagari
32	Barang bekas kurang dimanfaatkan, Perlu diadakan Pelatihan Pengolahan sampah/barang-barang bekas	Minat ada, bahan baku/barang bekas banyak	Nagari
33	Ibu-ibu RTM banyak yang mengganggu di rumah, Perlu diadakan Pelatihan Menjahit Pola	Minat tinggi	Nagari
34	Kurangnya ilmu life skill ibu-ibu RTM dalam pengolahan ubi kayu	Bahan baku ubi kayu banyak	Nagari
35	Keberadaan Lembaga Kredit Mikro Nagari belum mempengaruhi peningkatan usaha-usaha produktif	Lembaga kredit ada, modal ada untuk diedarkan	Nagari
36	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha yaitu kel. PPK, PKK II, PKK III, & II	Kelompok ada, anggota ada, usaha anggota kelompok ada, dana UPK kecamatan selalu ada untuk digulirkan	Nagari
37	Belum munculnya usaha bersama yang dikelola secara kolektif oleh kelompok	Peluang usaha ada, kelompok-kelompok ada	Nagari
38	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha	Kelompok ada, anggota ada, usaha anggota kelompok ada, dana UPK kecamatan selalu ada untuk digulirkan	Nagari
39	Kelompok-kelompok koperasi belum berbadan hukum	Aktifitas ada, kelompok dan anggota ada	Nagari
40	Keberadaan Koperasi di Kampung tidak dapat membantu Warga, tidak ada kegiatan yang dikelola	Lembaga Tidak di topang oleh modal usaha-usaha masyarakat dan P2 SPP	Nagari
41	Usaha Ekonomi produktif tidak marak muncul di tengah-tengah masyarakat	Peningkatan penghasilan dana ekonomi masyarakat	Nagari
42	BUMNag belum berkembang, Perlu penambahan modal BUMNag	Bumnag ada	Nagari
43	Kurang efektifnya BUMNag Nagari dalam usaha Mikro dalam nagari, perputaran modal jadi lambat,	Meningkatkan usaha masyarakat	Nagari

1	Sering terjadi banjir diwaktu hujan, perlu Penanggulangan bencana Banjir dalam keadaan darurat belum ada	Keadaan darurat/tak terduga	Nagari
2	Pengadaan Sembako bagi yang terdampak musibah seperti Banjir, Kebakaran dan Gempa Bumi belum ada	Keadaan darurat/tak terduga	Nagari
3	Pemberian Sembako untuk Keluarga yang mendapat musibah belum ada	Keadaan darurat/tak terduga	Nagari
4	Pemberian bantuan makan pada keluarga yang terkena musibah kematian dan kelaparan belum ada	Keadaan darurat/tak terduga	Nagari
5	Dapur untuk Keadaan Darurat belum ada	Keadaan darurat/tak terduga	Nagari

3.1.2 Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Bagan Kelembagaan

a. Diagram Kelembagaan



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Tabel 1 b

No	Kelembagaan	Masalah	Potensi
1	Pemerintah nagari	Prasarana dan sarana Kantor Wali Nagari belum memadai	Kantor ada, ruangan ada
		Kurangnya pemahaman tentang tupoksi Aparatur Nagari	Kehadiran rutin ada
		Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar
2	Bamus	Kurangnya pemahaman tentang tupoksi	Adanya Tamatan Sarjana
		Pertemuan menampung aspirasi masyarakat tidak ada	Sarana & Media komunikasi ada
		Belum ada mengeluarkan Peraturan Nagari yang menyangkut permasalahan masyarakat	Pelatihan telah diadakan
3	LPMN	Kurangnya Pengetahuan LPMN tentang menggali potensi nagari	Pengurus dan Anggota LPMN ada yang Sarjana
		Kelembagaan LPMN belum tersosialisasi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat	Peran dan fungsinya sangat penting, tempat dan media ada
		Kegiatan LPMN kurang aktif	Susunan pengurus profesional
		Kurang mengetahui Tupoksi LPMN	Tersedianya Buku Petunjuk
4	PKK	Kurangnya Kesejahteraan Kader PKK	Kader ada, PKK ada
		Kurangnya pembinaan dari PKK kecamatan	Kader ada, PKK ada
		Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK ada
5	KAN	Kurangnya Kesejahteraan KAN	Pengurus KAN ada
		Masih ada anggota KAN yang belum memahami sepenuhnya masalah adat	Masih ada ninik mamak sebagai tempat belajar
		Kegiatan KAN tidak aktif	KAN ada, punya peran penting
6	Majelis Taqlim	Kurangnya Biaya Operasional	Bisa beriyuran
		Susahnya berkumpul bersama anggota	Ada perkumpulan

7	Pemuda	Kegiatan Pemuda tidak aktif	Susunan Pengurus ada
8	Kelompok Tani	Banyak anggota Karang Taruna/Pemuda yang menganggur	SDM
9	Linmas	Sebagian kegiatan kelompok tani tidak optimal	Susunan pengurus ada
10	BUMNag	Kegiatan Linmas tidak aktif	Susunan pengurus ada
		Jumlah anggota masih sedikit	SDM

3.1.3 Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Kalender Musim

a. Gambar Kalender Musim

Tabel
HASIL KAJIAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	BULAN											
	JAN	PEB	MRT	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES
Kekurangan air bersih												
Kesehatan (banyak penyakit)												
Banjir												
Tanam												
Panen												

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI	Solusi/ Kebijakan
1	Pada musim hujan, areal sawah tergenang banjir	Kelompok Tani	Perbaikan saluran irigasi
2	Pada musim tanam, hama tikus & tanaman merajalela di areal sawah	Kelompok Tani	Pelatihan dan penyuluhan
3	Pada musim tanam harga pupuk masih tinggi	Kelompok Tani, BUMNag	Bantuan Pupuk Subsidi

3.1.4 Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Adapun hasil Pengkajian Tindakan Masalah dari Pengkajian Keadaan Nagari dengan menggunakan metode sketsa Nagari, Bagan Kelembagaan, dan Kalender Musim dapat dilihat pada Tabel Berikut

Tabel
Daftar Pengkajian Tindakan Masalah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

No	MASALAH	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang layak
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI					
1.	Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum layak huni	Pendanaan	Tanah aset nagari ada	Agar segera di berikan dana	Agar pembangunan Kantor Wali Nagari di lanjutan
2.	Pagar Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	Pendanaan	Tanah aset nagari ada	Agar segera di berikan dana	Agar dibangun Pagar yang permanen
3.	Tempat Parkir Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	Pendanaan	Tanah aset nagari ada	Agar segera di berikan dana	Tempat parkir dibangun
4.	Pos Pemuda/Pos Ronda dan perlengkapannya belum memadai	Belum ada pos pemuda yang layak pakai.	Lokasi ada	Agar dibangun posronda	Agar ada pembanunan Pos Pemuda dan perengkapannya
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI					
1.	Honor Pengajar (PAUD/MDA/TPA/TPSA/Guru Irama Al-Qur'an) belum memadai	Minimnya pendanaan kesejahteraan guru	Guru ada, murid ada	Agar diberikan insentif yang memadai	Agar guru pengajar disejahterakan
2.	Kurangnya buku bacaan PAUD	Belum adanya pendanaan yang memadai	Anak usia sekolah banyak, keinginan belajar kuat	Agar dapat diberikan bantuan Buku	Agar dapat diberikan bantuan Buku
3.	Belum adanya Pelatihan Pembacaan Khutbah bagi Anak-anak dan remaja	Sulit mendapat guru untuk didatangkan	Keinginan belajar tinggi	Supaya anak pandai membaca khutbah	Supaya anak pandai membaca khutbah
4.	Gedung PAUD/ TK masih menumpang pada rumah warga	Belum adanya pendanaan yang memadai	Murid ada, tenaga guru ada	Agar dapat dibangun gedung	Pembangunan Gedung PAUD
5.	Gedung MDA masjid Nurul Yaqin terbengkalai dan Mobiler tidak ada	Tidak ada swadaya dari pemerintah	Murid banyak, lokasi ada, tenaga dan material ada	Renovasi MDA	Renovasi MDA

		dan masyarakat			
6	Mobil SDN 19 Tanjung Durian banyak yang kurang	Belum adanya pendanaan yang memadai	Lokasi ada, murid ada	Agar dapat diberikan Saprasi/mobil er	Agar dapat diberikan Saprasi/mobil er
7	Pelatih Randai belum disejahterakan	Minimnya pendanaan kesejahteraan guru	Guru ada, murid ada, sanggar seni ada	Agar diberikan insentif yang memadai	Diberikan honor yang memadai
8	Kesenian tradisional randai, talempong, tari-tarian tidak dikenal dan dikuasai oleh generasi muda	Pemuda kurang mengenal seni budaya	Budaya luhur dari nenek moyang, masih ada yang bisa mengajarkan kepada generasi penerus	Agar diadakan pelatihan	Perlu diberikan Pelatihan
9	Pengadaan Alat-alat kesenian tradisional seperti talempong dan alat-alat kesenian randai lainnya masih tidak layak pakai	Kurangnya pendanaan	Sanggar ada, pelatih ada, anak didik ada	Agar diberikan bantuan	Agar diberikan bantuan alat-alat kesenian
10	Pengadaan Pakaian tari masih kurang	Kurangnya pendanaan	Sanggar ada, pelatih ada, anak didik ada	Agar diberikan bantuan	Agar diberikan pakaian tari
11	Pelatihan Adat dan Budaya Minang belum ada	Obsi dari Dinas Pariwisata minim	Minat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diberikan pelatihan
12	Kegiatan kesenian anak nagari kurang diminati	Kurangnya pengetahuan	Sanggar seni ada, anak-anak ada	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
13	Banyak Murid RTM yang berprestasi, pembagian beasiswa RTM Tidak Merata	Banyak siswa RTM putus sekolah	Murid Golongan RTM ada, mahasiswa ada	Agar dapat diberikan bantuan Siswa RTM	Agar dapat diberikan bantuan Bea Siswa RTM
14	Belum adanya Pagar SDN 19 Tanjung Durian yang Permanen	Belum adanya pendanaan yang memadai	Lahan ada, murid ada	Agar dapat dibangun pagar	Pembangunan Pagar SD 19 Tj. Durian yang permanen
15	Masih ada balita, Ibu hamil, dan lansia yang konsumsi gizinya kurang memadai	Lemahnya mata pencaharian	Balita, ibu hamil dan lansia selalu ada, pengetahuan tentang gizi tidak merata pada masyarakat	Agar diadakan gizi tambahan	Agar berikan gizi tambahan
16	Masih banyak anak RTM kurang gizi	Lemahnya mata pencaharian	Anak kurang gizi ada	Agar diberikan gizi tambahan	Agar diberikan gizi tambahan
17	Belum adanya program kegiatan untuk Lansia dan pemberian makan tambahan	Belum adanya pendanaan yang	Lansia ada	Agar diberikan gizi tambahan	Agar diadakan senam Lansia sekaligus PMT

18.	Kurangnya kesejahteraan Kader Posyandu	memadai	Aktifitas kader yang kurang memadai	Kegiatan ada	Agar transpor kader lebih ditingkatkan	Agar transpor kader lebih ditingkatkan
19.	Belum ada Pakaian seragam bagi kader-kader	Pendanaan yang kurang memadai	Kader-kader ada	Agar diberikan pakaian seragam	Agar diberikan pakaian seragam	
20.	Kegiatan posyandu kurang menarik minat masyarakat	Tidak adanya kegiatan tertentu	Kader yandu ada, kegiatan yandu ada, peserta yandu ada	agar diadakan jadwal tertentu	agar diadakan jadwal tertentu	
21.	Belum adanya kesejahteraan Kader KB, Nagari Siaga, PTM dan Puskel	Aktifitas kader kurang memadai	Kader ada, kegiatan ada	Perlu diberikan insentif	Perlu diberikan insentif	
22.	Tempat Posyandu yang layak tiap Kampung belum ada	Sulit beraktifitas di waktu Yandu	Kegiatan yandu aktif tiap bulan	Agar tempat posyandu ada di setiap kampung	Agar tempat posyandu ada di setiap kampung	
23.	Peralatan kesehatan Poskesri kurang memadai	Kurangnya fasilitas dari penda	Poskesri ada, Bidan desa ada, pasien banyak	Supada dapat diadakan alat	Agar diberikan bantuan alat-alat untuk poskesri	
24.	Belum ada Alat-alat penimbangan yang layak di Posyandu	Kurangnya fasilitas dari penda	Kegiatan yandu ada, balita ada	Supada dapat bantuan alat	Supada dapat bantuan alat penimbangan	
25.	Untuk mendukung program Germas perlu diberikan Tutor Germas	Belum adanya pendanaan yang memadai	Masyarakat ada	Perlu diberikan transport	Perlu diberikan transport untuk tutor	
26.	Biaya untuk berobatan bagi masyarakat terasa berat. Masih ada RTM yang belum punya kartu BPJS / KIS	Karena besarnya biaya pengobatan	RTM ada, Layanan BPJS/KIS ada dari pemerintah	Agar diberikan BPJS/KIS	Agar diberikan BPJS/KIS	
27.	Masih ada RTM belum mendapat bantuan PKH	Banyak warga RTM	Golongan RTM ada	Agar diberikan bantuan PKH	Agar diberikan bantuan PKH	
28.	Belum adanya Jalan lingkaran ujung tanah menuju kuburan	Jalan belum ada	Lahan ada, warga ada	Perlu ada pembukaan jalan	Perlu ada pembukaan jalan	
29.	Jalan usaha tani di belakang Gang Rang Bayang ke perumahan belum ada, biaya produksi tinggi	Warga sekitar sulit beraktifitas	Lahan ada, warga ada	Perlu ada pembukaan jalan	Perlu ada pembukaan jalan	
30.	Ketika hujan Jalan Samping Rumah si Nas ke Jalan Baru selalu becek	Jalan belum di rabat Beton	Pengerasan sudah ada	Perlu di rabat beton	Perlu di rabat beton	
31.	Belum adanya Jalan depan Gang Rang Bayang ke Jalan Baru	Jalan belum ada	Lahan ada	Perlu ada pembukaan jalan	Perlu ada pembukaan jalan	
32.	Jalur alternatif ke SMA 2 terlalu jauh	Pembebasan lahan belum	Lahan ada, jalur alternatif	Jalan alternatif	Pembukaan jalan ke SMA 2	

		ada			dilanjutkan
33	Jalan tigo ruang sampai ke Kantor Wali Nagari banyak yang berlobang	Jalan banyak berlobang, mengganggu aktifitas warga	Pengerasan sudah ada	Agar segera di rabat beton	Agar dapat di rabat beton ulang
34	Jalan dari Tigo ruang ke Suharang sawah belum ada	warga sulit beraktifitas	Lahan ada, warga ada	agar dapat di buka jalan baru	Agar dibuka jalan baru
35	Jalan yang sudah banyak berlobang, perlu Rehabilitasi jalan ujung gurun I	Jalan banyak berlobang, mengganggu aktifitas warga	Lahan ada	Agar segera di rabat beton	Agar jalan di rabat beton ulang
36	Jalan dari Simpang Catta sampai ke Jembatan Api-Api sering becek ketika hujan	Aktifitas lalu lintas terganggu	Lahan ada	Diberikan bantuan dana	Agar segera di aspal
37	Bahu jalan belum ada	Kendaraan sulit berpapasan	Lokasi ada	Agar dibangun bahu jalan	Agar dapat dibangun bahu jalan
38	Jalan dari rumah Meri sampai rumah Da Man Kopi sering becek ketika hujan	Warga sekitar sulit beraktifitas	Lahan ada	Agar dibangun jalan	Agar dirabat beton
39	Jalan selalu becek ketika hujan dan air selalu tergenang.	Warga sekitar sulit beraktifitas	Lokasi ada	Agar dibangun jalan	Agar dirabat beton
40	Jalan Rumah Sawah sampai ke SD 19 (Jalan lingkar rumah sawah) ketika hujan sering becek	Warga sekitar sulit beraktifitas	Lahan ada, warga ada	Agar dibangun jalan lingkar	Agar dirabat beton
41	Jalan dari SDN 19 ke Lubuk Batu sering becek diwaktu hujan	Warga sekitar sulit beraktifitas	Lahan ada, warga ada	Agar dapat dibangun pematiran	Agar di rabat beton
42	Untuk membuka jalur evakuasi Stunami dari Lubuk Bay ke Bukit Tuajung	Penyelarnata warga tsunami	Lahan ada	Perlu dibangun jembatan evakuasi tsunami	Jembatan evakuasi Stunami
43	Shalter di Nagari belum ada	Antisipasi bencana tsunami	Lokasi ada	Pembangunan shalter	Perlu dibangun shalter
44	Rehabilitasi Bronjong Jalan Ujung Grun I	Bronjong jalan ujung gurun belum ada	Lokasi ada, Pemuda banyak	Perlu dibangun bronjong	Perlu dibangun bronjong
45	Batang bayang Selalu mengancam Rumah Warga di kala Hujan, sehingga Tanah pemukiman Terjun kedalam batang Air	Sering terjadi banjir	Lokasi ada, Pemuda banyak	Perlu normalisasi	Perlu normalisasi
46	Kegiatan rapat-rapat dan lain-lain belum ada tempat yang memadai	Pembebasan lahan belum ada	Kegiatan rapat/ pertemuan banyak	Diberikan dana	Perlu di bangun Gedung serba guna

47.	Gapura Masjid Al-Kasyaf belum ada.	Untuk mengefektifkan masjid	Lokasi ada	Diberikan bantuan dana	Perlu di bangun Gapura Masjid
48.	Sering terjadi longsor tanah pemukiman warga di waktu air meluap yang mengancam pemukiman warga.	Pemukiman warga telan korban	Rumah-rumah sudah ada sejak lama.	Agar diadakan pengalihan batang air	Batang air dialihkan
49.	Jalan dari IB imunisasi sampai Asam Kamba belum ada saluran draenase, ketika hujan air selalu tergenang.	Air selalu tergenang	Lokasi ada	Agar dibangun Draenase	Agar dibangun Draenase
50.	Ketika musim hujan aliran air tidak lancar, perlu dibangun irigasi dari PNPM ke Jalan baru Taluk Lokan	Air tidak lancar	Lahan ada	Agar irigasi PNPM ke Jl. Baru Taluk Lokan dilanjutkan	Agar irigasi PNPM ke Jl. Baru Taluk Lokan dilanjutkan
51.	Musim penghujan tali bandar dari Tanah sarik (Rawang) ke Jalan baru tidak lancar	Sulit warga untuk mengairi sawahnya	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Agar diperbaiki irigasi	Dibangun irigasi yang permanen
52.	Saluran air dari ujung tanah ke mushala tidak lancar.	Sulit warga ke sawah	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Agar diperbaiki irigasi	Dibangun irigasi yang permanen
53.	Diwaktu Hujan selalu air mengenangi pemukiman Warga karena tidak adanya Saluran Draenase kiri kanan dari Buah Kubang ke SDN 19	air sering tergenang	Lahan ada	Perlu dibangun irigasi	Perlu dibangun draenase
54.	Ketika hujan air selalu mengenangi rumah warga, karena belum adanya draenase Ujung Gurun	Air tidak mengalir	Lokasi ada	Agar saluran draenase dibangun	Agar saluran draenase dibangun
55.	Lanjutan Pembangunan Irigasi simpang empat ke Ujung Tanah untuk mengatasi air yang selalu tergenang ketika hujan	Saluran irigasi tidak lancar	Lahan ada	Agar dibangun irigasi	Pembangunan Irigasi permanen
56.	Air tidak lancar ketika hujan sering tersumbat, perlu dibangun irigasi dari simpang buah kubang ke subarang sawah	Saluran irigasi tidak lancar	Lokasi ada	Agar dibangun irigasi	Pembangunan Irigasi permanen
57.	Sambungan Irigasi dari Cucian ke Bariyang tidak lancar, ketika hujan air sering tergenang.	Sulit warga untuk mengairi sawahnya	Lahan sawah yang dialiri luas, saluran lama sudah ada, sumber air ada	Agar irigasi diperbaiki	Dibangun irigasi yang permanen
58.	Setiap kali hujan deras air selalu tergenang, perlu dibangun Drainase jalan sumur gadang	Saluran draenase tidak ada	Lahan ada, lokasi mengizinkan	Agar dapat dibangun draenase	Agar dapat dibangun draenase

59	Perlengkapan alat-alat kematian/jenazah (Tenda, Diesel, Keranda, Tempat pemandian Jenazah, Gunting, Baskom, Kursi, dll) belum lengkap	Perlengkapan belum ada		Agar dapat diberikan perlengkapan	Agar dapat diberikan bantuan perlengkapan
60	Penerangan / Lampu Jalan Nagari belum memadai	Kurangnya pendanaan	Lokasi ada	Agar dapat diberikan penerangan jalan	Agar dapat diberikan lampu penerangan jalan
61	Masih ada Rumah Tidak Layak Huni	Banyak rumah tidak layak huni	Masyarakat ada, RTLH ada	Agar dapat diberikan tambahan dana	Agar diberikan bantuan RTLH
62	Masih banyak RTM yang belum memiliki MCK.	Masih banyak RTM yg belum memiliki WC	Lokasi ada, masyarakat miskin ada	Agar diberikan bantuan	Agar diberikan bantuan MCK
63	Bantuan Pompa Air bersih belum ada	Pendanaan yang kurang memadai	Air bersih ada	Agar diberikan bantuan	Agar diberikan bantuan Pompa air bersih
64	Belum adanya Penyediaan tempat sampah	Kurangnya pendanaan yang memadai	Sampah ada	Agar diberikan bantuan	Agar diberikan tempat sampah
65	Sanitasi lingkungan kurang memadai	Belum terpenihunya otnik	Lahan ada	Agar dibangun sanitasi yang memadai	Agar dibangun sanitasi yang memadai
66	Belum ada saluran draenase keliling kampung, aliran air tidak lancar ketika hujan, banyak terjadi genangan air	Saluran draenase tidak ada	Lahan ada	Agar dapat dibangun draenase	Agar dapat dibangun draenase
67	Pengadaan alat Pemisah sampah belum ada	Kurangnya pendanaan yang memadai	Sampah ada	Agar diberikan bantuan alat	Agar diberikan bantuan alat
68	Tidak ada tanaman nagari nan asri sebagai tempat bermain anak-anak dan berolahraga	Tidak ada taman	Bia menjadi tempat kegiatan olahraga, silaturahmi antar warga.	Agar diadakan penghijauan	Agar diadakan penghijauan
69	Pengetahuan pola perkebunan sangat kurang, perlu adanya pelatihan	Kurangnya pengetahuan	Lahan luas, tani merupakan usaha utama mayoritas masyarakat	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
70	Posluhtan Kelompok Tani belum ada	Untuk mengaktifkan kelompok tani	Kelompok tani ada	Agar Posluhtan dibangun	Agar Posluhtan dibangun

71	Petugas penyuluh jarang melakukan pembinaan kepada petani, perlu adanya pembinaan dari PPL Pertanian	PPL tidak aktif	Masyarakat tani ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diberikan PPL yang aktif
72	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang	Tanaman warga diserang hama	Lahan ada, petani ada	Agar diberikan pelatihan	Diadakan penyuluhan
73	Tidak adanya bantuan Bibit tanaman perkebunan dari Pemerintah	Kurangnya pendanaan	Lahan ada, petani ada	Agar diberikan bibit	Diberikan bantuan bibit
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI					
1.	Kelembagaan LPMN tentang menggali kurangnya potensi nagari	Karena tidak ada insentif	Peran dan fungsinya sangat penting, tempat dan media ada.	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
2.	Belum adanya solusi dalam penanggulangan bencana alam karena belum ada pelatihan	Kurangnya partisipasi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Agar diberikan pelatihan	Agar diberikan pelatihan
3.	Event Budaya Tahunan (Kegiatan Festival Randai) belum ada	Kurangnya partisipasi masyarakat		Perlu diadakan tiap tahun	Perlu diadakan tiap tahun
4.	Kurangnya dana dalam rangka memperingati 17 Agustus	Kurangnya partisipasi masyarakat	Kegiatan Ada	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
5.	Kurangnya dana bantuan dalam kegiatan MTQ tingkat Kampung	Kurangnya pendanaan	Kegiatan ada	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
6.	Anak-anak muda makin marak mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak mental generasi muda, Perlu pembinaan untuk generasi muda	Kemajuan zaman	Pemuda masih punya masa depan yang panjang, generasi penerus bangsa	Diadakan sosialisasi tentang narkoba	Diadakan pembinaan
7.	Budaya gotong royong sudah mulai luntur	Masyarakat kurang berpartisipasi	Budaya luhur dari nenek moyang	Agar daktifkan ras persatuan	Diberikan pemahaman kepada masyarakat
8.	Pelatihan kewirausahaan Pemuda belum ada	Pemuda tidak aktif	Kelompok pemuda ada	Agar diberikan pelatihan	Agar diberikan pelatihan
9.	Sarana/Lapangan Olahraga Folly, Takrau, Badminton dan Futsal belum memadai	Kurangnya swadaya dari masyarakat	Lapangan ada	Perlu diadakan sarana dan Prasarana olahraga	Perlu diadakan sarana dan Prasarana olahraga
10.	Kurangnya Sarana dan prasarana Olahraga	Kurangnya swadaya dari masyarakat	Minat masyarakat tinggi, Lokasi ada	agar diberikan sarana dan prasarana olahraga	agar diberikan sarana dan prasarana olahraga
11.	Lapangan Tenis Meja belum ada	Belum adanya pendanaan	Lokasi ada, Pemuda banyak	Agar lapangan tenis mejad	Agar lapangan tenis mejad dibangun

71	Petugas penyuluh jarang melakukan pembinaan kepada petani, perlu adanya pembinaan dari PPL Pertanian	PPL tidak aktif	Masyarakat tahu ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diberikan PPL yang aktif
72	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang	Tanaman warga diserang hama	Lahan ada, petani ada	Agar diberikan pelatihan	Diadakan penyuluhan
73	Tidak adanya bantuan Bibit tanaman perkebunan dari Pemerintah	Kurangnya pendanaan	Lahan ada, petani ada	Agar diberikan bibit	Diberikan bantuan bibit
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI					
1	Kelembagaan LPMN tentang menggali kurangnya potensi nagari	Karena tidak ada insentif	Peran dan fungsinya sangat penting, tempat dan media ada	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
2	Belum adanya solusi dalam penanggulangan bencana alam karena belum ada pelatihan	Kurangnya partisipasi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Agar diberikan pelatihan	Agar diberikan pelatihan
3	Event Budaya Tahunan (Kegiatan Festival Randa) belum ada	Kurangnya partisipasi masyarakat		Perlu diadakan tiap tahun	Perlu diadakan tiap tahun
4	Kurangnya dana dalam rangka memperingati 17 Agustus	Kurangnya partisipasi masyarakat	Kegiatan Ada	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
5	Kurangnya dana bantuan dalam kegiatan MTQ tingkat Kampung	Kurangnya pendanaan	Kegiatan ada	Agar dapat dianggarkan	Agar dapat dianggarkan
6	Anak-anak muda makin marak mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak mental generasi muda, Perlu pembinaan untuk generasi muda	Kemajuan zaman	Pemuda masih punya masa depan yang panjang, generasi penerus bangsa	Diadakan sosialisasi tentang narkoba	Diadakan pembinaan
7	Budaya gotong royong sudah mulai luntur	Masyarakat kurang berpartisipasi	Budaya luhur dari nenek moyang	Agar daktifkan ras persatuan	Diberikan pemahaman kepada masyarakat
8	Pelatihan kewirausahaan Pemuda belum ada	Pemuda tidak aktif	Kelompok pemuda ada	Agar diberikan pelatihan	Agar diberikan pelatihan
9	Sarana/Lapangan Olahraga Folly, Takrau, Badminton dan Futsal belum memadai	Kurangnya swadaya dari masyarakat	Lapangan ada	Perlu diadakan sarana dan Prasarana olahraga	Perlu diadakan sarana dan Prasarana olahraga
10	Kurangnya Sarana dan prasarana Olahraga	Kurangnya swadaya dari masyarakat	Minat masyarakat tinggi, Lokasi ada	agar diberikan sarana dan prasarana olahraga	agar diberikan sarana dan prasarana olahraga
11	Lapangan Tenis Meja belum ada	Belum adanya pendanaan	Lokasi ada, Pemuda banyak	Agar lapangan tenis mejad	Agar lapangan tenis mejad dibangun

		yang memadai		dibangun	
12.	Belum adanya lapangan futsal	Belum adanya pendanaan yang memadai	Lokasi ada, Pemuda banyak	Agar lapangan futsal dibangun	Agar lapangan futsal dibangun
13.	Pengetahuan adat budaya Minangkabau semakin dilupakan, pimpinan adat banyak yang tidak menguasai secara utuh adat dan budaya Minang	Kurangnya pengetahuan	Kearifan lokal yang sudah terbentuk dari masa lalu, Budaya luhur dari nenek moyang	Diadakan sosialisasi	Diberikan pelatihan
14.	Kurang efektifnya PKK dalam nagari	Kurangnya pengetahuan	Peran dan fungsi PKK sangat penting, tempat dan media ada	Agar diadakan pembekalan	Agar diadakan pembekalan/ pelatihan
15.	Bantuan PHBI perlu ditingkatkan	Minimnya pendanaan	Kegiatan ada	Agar dianggarkan	Agar dianggarkan
16.	Bantuan PHBN perlu ditingkatkan	Minimnya pendanaan	Kegiatan ada	Agar dianggarkan	Agar dianggarkan
17.	Kesejahteraan Honor Imam dan Garin Masjid belum memadai	Minimnya pendanaan kesejahteraan guru	Imam ada	Agar diberikan honor Imam dan Garin Masjid	Pendanaan kesejahteraan Imam dan Garin Masjid
18.	Tidak adanya Transport Guru/Ustad untuk kegiatan Majelis ta'lim tiap kampung	Belum adanya pendanaan yang memadai	Majelis ta'lim ada	Supaya diadakan wirid	Agar diberikan transpor guru/ustad
19.	Alat-Alat Kesenian untuk Majelis Ta'lim belum lengkap	Kurangnya pendanaan	Majelis ta'lim aktif	Agar diberikan perlengkapan	Agar diberikan perlengkapan alat kesenian
20.	Prasarana masjid dan mushalla masih banyak yang kurang	Kurangnya pendanaan	Kegiatan ada	Agar dianggarkan	Agar diberikan prasarana
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI					
1.	Masyarakat sulit mendapatkan Bantuan Keramba, bibit ikan dan udang dari Pemerintah	Kurangnya asupan dan pemerinah	Penampung ada	Agar diberikan bantuan bibit ikan	Agar diberikan bantuan bibit ikan
2.	Mesin Bajak Sawah belum memadai	Kurangnya pendanaan	Penerima manfaat ada	Berikan bantuan	Diberikan bantuan mesin Bajak
3.	Bantuan Mesin Perontok Padi belum ada	Kurangnya pendanaan	Penerima manfaat ada	Berikan bantuan	Diberikan bantuan Perontok padi
4.	Sulitnya masyarakat mendapat Bantuan Benih padi unggul	Kurangnya bantuan	Lahan pertanian luas	Diberikan bantuan benih	Perlu diberikan bantuan benih

5	Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu adanya bantuan Pupuk Bersubsidi dari pemerintah.	Kurangnya bantuan pendanaan	Lahan pertanian luas	Diberikan bantuan pupuk	Diberikan Bantuan pupuk bersubsidi
6	Belum adanya pelatihan Penanaman cabe bagi kelompok tani	Kurangnya pendanaan	Kelompok tani ada, lahan ada	Agar diadakan sosialisasi	Agardiberikan pelatihan
7	Pelatihan Penanaman padi Salibu belum diberikan kepada kelompok tani	Kurangnya pendanaan	Kelompok tani ada, lahan ada	Agar diadakan sosialisasi	Agardiberikan pelatihan
8	Untuk meningkatkan produksi yang lebih baik diperlukan pelatihan tanam jagung	Kurangnya pendanaan	Kelompok tani ada, lahan ada	Agar diadakan sosialisasi	Agardiberikan pelatihan
9	sulitnya masyarakat mendapatkan ternak bantuan dari Pemerintah (Sapi Unggul), sehingga masyarakat hanya memelihara ternak masyarakat	Kurangnya asupan dari pemerintah	Penampung ada	Agar diberikan bantuan sapi	Agar diberikan bantuan sapi
10	Masyarakat sulit mendapatkan bantuan Pengembangan dan pengelolaan itik	Kurangnya asupan dari pemerintah	Penampung ada	Agar diberikan bantuan itik	Diberikan bantuan itik
11	Masyarakat sulit mendapatkan Bantuan Pengembangan dan pengelolaan Ayam pedaging	Kurangnya asupan dari pemerintah	Penampung ada	Agar diberikan bantuan ayam pedaging	Agar diberikan bantuan ayam pedaging
12	Belum ada pelatihan kelompok tani dalam pengolahan keramba ikan	Kurangnya pendanaan	Kelompok tani ada	Agar diadakan sosialisasi	Agardiberikan pelatihan
13	Belum ada pelatihan budidaya ikan air tawar	Kurangnya pendanaan	Kelompok tani ada	Agar diadakan sosialisasi	Agardiberikan pelatihan
14	Pengetahuan pola pertanian kurang dipahami, produksi masih kurang	Kurangnya pengetahuan petani	Meningkatkan hasil pertanian	Perlu sosialisasi	Perlu diadakan pelatihan
15	Jerami banyak dibakar petani setelah panen, tidak memanfaatkan dengan optimal perlu adanya pelatihan untuk kelompok tani	Tidak ada skil dalam pengolahan	Kelompok tani ada	Diadakan pelatihan	Penyuluhan/ pelatihan
16	Pengetahuan petani tentang pertanian organik sangat kurang	Kurangnya skill	minat kelompok tani tinggi	Diadakan pelatihan	Penyuluhan/ pelatihan
17	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang, perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian.	SDM sangat lemah	minat kelompok tani tinggi	Diadakan sosialisasi	Penyuluhan/ pelatihan
18	Lahan-lahan sekitar taluk lokan masih banyak belum digarap	Kurang modal usaha	Lahan produktif di sekitar taluk lokan	Dibantu dalam permodalan	Dibantu dalam permodalan

19.	Sering Ternak Masyarakat diserang penyakit, perlu adanya bantuan pakan dan obat-obatan untuk ternak.	Kurangnya ilmu dalam memelihara ternak	Penampung ada	Diberikan pelatihan	Diberikan bantuan obat dan pakan ternak
20.	Pengetahuan pola pertanian ramah lingkungan, efektif dan produksi masih kurang	SDM sangat lemah	Lahan ada	Diadakan sosialisasi	Penyuluhan/ pelatihan
21.	Penyuluhan Pertanian kurang terserap baik oleh masyarakat, dan petugas penyuluh pertanian jarang melakukan pembinaan kepada petani. Perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian	PPL kurang aktif	minat kelompok tani tinggi	Perlu sosialisasi	Penyuluhan/ pelatihan
22.	Kelompok diskusi tentang pertanian tidak ada	Tidak ada penyuluhan		Butuh PPL yang handal	Diadakan sosialisasi
23.	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat	Kurangnya pengetahuan	Meningkatkan kapasitas perangkat	Perlu diberikan pelatihan	Perlu diberikan pelatihan
24.	Belum adanya Produk Hukum yang dihasilkan Bamus perlu Pelatihan Bamus	Kurangnya pengetahuan	Meningkatkan kapasitas Bamus	Perlu diberikan pelatihan	Perlu diberikan pelatihan
25.	Belum adanya Pelatihan Sepeda Motor, Elektronik, perabot bagi pemuda	Belum adanya pendanaan yang memadai	Pemuda ada, minat ada	Agar pemuda lebih kreatif	Agar diberikan pelatihan
26.	Kurangnya pelatihan Sulaman Bayangan dan Sekolah Kecantikan bagi Ibu-Ibu	Kurangnya pengetahuan	Kelompok ibu-ibu ada, minat ada	Agar diadakan pembekalan	Agar diadakan pembekalan
27.	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos belum ada	Kurangnya pengetahuan	Bahan baku ada, masyarakat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
28.	Pelatihan Pengolahan Batok Kelapa belum ada	Kurangnya pengetahuan	Bahan baku ada, masyarakat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
29.	Pelatihan Pembuatan Gasing belum ada	Kurangnya pengetahuan	Bahan baku ada, masyarakat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
30.	Pelatihan Pembuatan Tengkulak atau Saluak belum ada	Kurangnya pengetahuan	Bahan baku ada, masyarakat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
31.	Pelatihan Pengolahan Limbah Organik belum ada	Kurangnya pengetahuan	Bahan baku ada, masyarakat ada	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
32.	Barang bekas kurang dimanfaatkan, Perlu diadakan Pelatihan Pengolahan sampah/barang-barang bekas	Kurangnya pengetahuan	Minat ada, bahan baku/barang bekas banyak	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan
33.	Ibu-ibu RTM banyak yang menganggur di rumah, Perlu diadakan Pelatihan Menjahit Pola untuk meningkatkan	Kurangnya pengetahuan	Minat tinggi	Agar diadakan pelatihan	Agar diadakan pelatihan

	perekonomian				
34	Kurangnya ilmu life skill ibu-ibu RTM dalam pengolahan ubi kayu	Kurang Pengetahuan	Bahan baku ubi kayu banyak	Agar diadakan pembekalan	Agar diadakan pembekalan/ pelatihan
35	Keberadaan Lembaga Kredit Mikro Nagari belum mempengaruhi peningkatan usaha-usaha produktif	Sulit untuk mendapatkan dana	Lembaga kredit ada, modal ada untuk diedarkan	Agar diadakan sosialisasi	Agar diadakan sosialisasi
36	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha yaitu kel. PPK, PKK II, PKK III, & II	Dalam pencicilan selalu macet	Kelompok ada, anggota ada, usaha anggota kelompok ada, dana UPK kecamatan selalu ada untuk digulirkan	Agar diadakan pengawasan	Diadakan pengawasan lapangan
37	Belum munculnya usaha bersama yang dikelola secara kolektif oleh kelompok	Kurangnya pendanaan	Peluang usaha ada, kelompok-kelompok ada	Agar dapat diberikan bantuan dana	Kucuran dana
38	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha	Sulit mendapatkan Dana	Kelompok ada, anggota ada, usaha anggota kelompok ada, dana UPK kecamatan selalu ada untuk digulirkan	Agar dikucurkan dana	Agar dikucurkan dana
39	Kelompok-kelompok koperasi belum berbadan hukum	Kecil usaha	Aktivitas ada, kelompok dan anggota ada	Agar diberikan bantuan	Asupan dana
40	Keberadaan Koperasi di Kampung tidak dapat membantu Warga, tidak ada kegiatan yang dikelola	Kurangnya bantuan pendanaan	Lembaga Tidak di tolong oleh modal usaha-usaha masyarakat dan P2 SPP	Butuh kucuran dana	Butuh kucuran dana
41	Usaha Ekonomi produktif tidak marak muncul di tengah-tengah masyarakat	Kurangnya pengetahuan	Peningkatan penghasilan dana ekonomi masyarakat	Perlu sosialisasi	Perlu sosialisasi
42	BUMNag belum berkembang, Perlu penambahan modal BUMNag	Dalam pencicilan selalu macet	Dana Mikro aset Nagari yang bisa beredar di masyarakat, penerapan bunga rendah	Agar diadakan pengawasan lapangan	Diberikan tambahan modal
43	Kurang efektifnya BUMNag Nagari dalam usaha Mikro dan lainnya dalam nagari, perputaran modal jadi lambat.	Kurangnya skill dalam pengelolaan	BUMNag ada	Perlu pelatihan	Diberikan pelatihan

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK					
1	Sering terjadi banjir diwaktu hujan, perlu Penanggulangan bencana Banjir dalam keadaan darurat belum ada	Kajadian tak diduga	Keadaan darurat/tak terduga	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
2	Pengadaan Sembako bagi yang terdampak musibah seperti Banjir, Kebakaran dan Gempa Bumi belum ada	Kajadian tak diduga	Keadaan darurat/tak terduga	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
3	Pemberian Sembako untuk Keluarga yang mendapat musibah belum ada	kurangnya minat masyarakat	Keadaan darurat/tak terduga	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
4	Pemberian bantuan makan pada keluarga yang terkena musibah kematian dan kelaparan belum ada	Kajadian tak diduga	Keadaan darurat/tak terduga	Diadakan sosialisasi	Diadakan sosialisasi
5	Dapur untuk Keadaan Darurat belum ada	Belum ada dapur umum	Keadaan darurat/tak terduga	Perlu dibangun dapur umum	Perlu dibangun dapur umum

3.1.5 Penentuan Peringkat Masalah

Dalam melaksanakan penentuan peringkat masalah Tim Penyusun RPJM menyepakati skor nilai sebagai berikut :

- Nilai tertinggi : 1-35
- Nilai Sedang : 36-65
- Nilai Rendah : 66-100

Adapun hasil penentuan peringkat masalah dari Pengkajian Keadaan Nagari dengan menggunakan metode Sketsa Nagari, Bagan Kelembagaan, dan Kalender Musim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Daftar Peringkat Masalah

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI								
1.	Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum layak huni	95	80	80	90	85	430	1
2.	Pagar Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	90	85	80	80	85	420	2

3	Tempat Parkir Kantor Wali Nagari Tanjung Durian belum ada	80	75	70	80	60	365	3
4	Pos Pemuda/Pos Ronda dan perlengkapannya belum memadai	50	50	65	60	50	275	4
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI								
1	Honor Pengajar (PAUD/MDA/TPA/TPSA/Guru Irama Al-Qur'an) belum memadai	70	60	65	60	60	305	40
2	Kurangnya buku bacaan PAUD	80	80	60	65	60	345	30
3	Belum adanya Pelatihan Pembacaan Khutbah bagi Anak-anak dan remaja	50	50	45	45	40	230	50
4	Gedung PAUD/TK masih menumpang pada rumah warga	80	85	70	75	75	385	13
5	Gedung MDA masjid Nurul Yaqin terbengkalai dan Mobiler tidak ada	90	70	80	75	80	395	7
6	Mobiler SDN 19 Tanjung Durian banyak yang kurang	60	55	45	50	50	260	51
7	Pelatih Randai belum disejahterakan	70	70	70	70	70	350	27
8	Kesenian tradisional randai, talempong, tari-tarian tidak dikenali dan dikuasai oleh generasi muda	60	65	50	60	70	305	41
9	Pengadaan Alat-alat kesenian tradisional seperti talempong dan alat-alat kesenian randai lainnya masih tidak layak pakai	80	80	60	75	70	365	20
10	Pengadaan Pakaian tari masih kurang	75	65	65	60	45	310	38
11	Pelatihan Adat dan Budaya Minang belum ada	50	55	45	50	50	250	56
12	Kegiatan kesenian anak nagari kurang diminati	60	55	45	50	50	260	50
13	Banyak Murid RTM yang berprestasi	90	90	60	75	70	385	11

	pembagian beasiswa RTM Tidak Merata							
14.	Belum adanya Pagor SDN 19 Tanjung Durian yang Permanen	80	75	75	70	70	370	16
15.	Masih ada balita, Ibu hamil, dan lansia yang konsumsi gizinya kurang memadai	75	70	70	60	60	335	32
16.	Masih banyak anak RTM kurang gizi	80	80	70	70	70	370	17
17.	Belum adanya program kegiatan untuk Lansia dan pemberian makan tambahan	60	65	65	70	50	310	39
18.	Kurangnya kesejahteraan Kader Posyandu	80	85	70	75	75	385	12
19.	Belum ada Pakaian seragam bagi kader-kader	70	60	60	65	60	315	36
20.	Kegiatan posyandu kurang menarik minat masyarakat	45	45	40	40	40	210	68
21.	Belum adanya kesejahteraan Kader KB, Nagari Siaga, PTM dan Puskel	60	60	65	65	60	310	37
22.	Tempat Posyandu yang layak tiap Kampung belum ada	65	65	70	65	60	325	33
23.	Peralatan kesehatan Poskesri kurang memadai	40	45	40	40	40	205	70
24.	Belum ada Alat-alat penimbangan yang layak di Posyandu	65	60	60	45	40	270	48
25.	Untuk mendukung program Germas perlu diberikan Tutor Germas	75	70	70	75	70	360	21
26.	Biaya untuk berobatan bagi masyarakat terasa berat. Masih ada RTM yang belum punya kartu BPJS / KIS.	60	60	50	45	45	260	49
27.	Masih ada RTM belum mendapat bantuan PKH	60	55	50	50	65	280	46

28	Belum adanya Jalan lingkar ujung tanah menuju kuburan	75	70	75	70	65	355	24
29	Jalan usaha tani di belakang Gang Rang Bayang ke perumahan belum ada, biaya produksi tinggi	90	85	85	80	85	425	4
30	Ketika hujan Jalan Samping Rumah si Nas ke Jalan Baru selalu becek	90	85	80	90	85	430	2
31	Belum adanya Jalan depan Gang Rang Bayang ke Jalan Baru	70	65	65	60	60	320	34
32	Jalur alternatif ke SMA 2 terlalu jauh	60	60	50	45	45	260	52
33	Jalan tigo ruang sampai ke Kantor Wali Nagari banyak yang berlobang	70	60	65	50	45	290	42
34	Jalan dari Tigo ruang ke Subarang sawah belum ada	80	70	70	80	75	375	14
35	Jalan yang sudah banyak berlobang, perlu Rehabilitasi jalan ujung gurun I	92	85	90	90	90	447	1
36	Jalan dari Simpang Cania sampai ke Jembatan Api-Api sering becek ketika hujan.	70	70	75	70	70	355	25
37	Bahu jalan belum ada, sehingga kendaraan yang berselisih susah.	50	45	50	45	45	235	58
38	Jalan dari rumah Meri sampai rumah Da Man Kopi sering becek ketika hujan.	45	50	50	50	50	245	31
39	Jalan selalu becek ketika hujan dan air selalu tergenang.	40	40	40	40	40	200	71
40	Jalan Rumah Sawah sampai ke SD 19 (Jalan lingkar rumah sawah) ketika hujan sering becek	70	70	75	75	70	360	22
41	Jalan dari SDN 19 ke	85	80	65	75	65	370	18

	Lubuk Batu sering becek diwaktu hujan							
42.	Untuk membuka jalur evakuasi Stunami dari Lubuk Bay ke Bukit Tuajung	70	60	50	50	50	280	47
43.	Shalter di Nagari belum ada	35	30	30	35	30	160	72
44.	Rehabilitasi Bronjong Jalan Ujung Gran I	90	85	80	80	85	420	5
45.	Batang bayang Selalu mengancam Rumah Warga di kala Hujan ,sehingga Tanah pemukiman Terjun kedalam batang Air	70	75	65	70	70	350	28
46.	Gedung serba guna Nagari belum ada	35	30	30	35	30	160	73
47.	Gapura Masjid Al-Kasyaf belum ada	80	75	75	60	75	365	19
48.	Sering terjadi longsor tanah pemukiman warga di waktu air meluap yang mengancam pemukiman warga.	45	45	40	40	40	210	65
49.	Jalan dari IB imunisasi sampai Asam Kamba belum ada saluran draenase, ketika hujan air selalu tergenang.	45	40	40	40	40	205	69
50.	Ketika musim hujan aliran air tidak lancar, perlu dibangun irigasi dari PNPM ke Jalan baru Taluk Lokan	45	45	40	45	40	215	63
51.	Musim penghujan tali bandar dari Tanah sarik (Rawang) ke Jalan baru tidak lancar.	80	75	60	75	60	350	29
52.	Saluran air dari ujung tanah ke mushala tida lancar.	60	55	55	60	55	285	44

53	Diwaktu Hujan selalu air mengenagi pemukiman Warga karena tidak adanya Saluran Drainase kiri kanan dari Buah Kubang ke SDN 19	70	80	80	70	75	375	15
54	Ketika hujan air selalu mengenangi rumah warga, karena belum adanya drainase Ujung Gurun	45	45	40	40	40	210	66
55	Lanjutan Pembangunan Irigasi simpang empat ke Ujung Tanah untuk mengatasi air yang selalu tergenang ketika hujan	90	85	80	80	85	420	6
56	Air tidak lancar ketika hujan sering tersumbat, perlu dibangun irigasi dari simpang buah kubang ke subarang sawah	55	60	50	60	65	290	43
57	Sambungan Irigasi dari Cucian ke Bariyang tidak lancar, ketika hujan air sering tergenang.	80	90	80	85	90	425	3
58	Setiap kali hujan deras air selalu tergenang, perlu dibangun Drainase jalan sumur gadang	80	80	75	75	80	390	10
59	Perlengkapan alat-alat kematian/jenazah (Tenda, Diesel, Keranda, Tempat penandian Jenazah, Gunting, Baskom, Kursi, dll) belum lengkap	60	60	40	45	50	255	53
60	Penerangan / Lampu Jalan Nagari belum memadai	70	70	50	65	60	315	35
61	Masih ada Rumah Tidak Layak Huni	75	75	65	70	70	355	26
62	Masih banyak RTM yang belum memiliki	75	70	75	70	70	360	23

MCK								
63.	Bantuan Pompa Air bersih belum ada	45	50	40	45	40	220	61
64.	Belum adanya Penyediaan tempat sampah	90	70	80	75	80	295	8
65.	Sanitasi lingkungan kurang memadai	50	50	50	59	55	264	55
66.	Belum ada saluran drainase keliling kampung, aliran air tidak lancar ketika hujan, banyak terjadi genangan air	80	85	75	85	70	395	9
67.	Pengadaan alat Pemisah sampah belum ada	60	60	55	50	60	285	45
68.	Tidak ada tanaman nagari nan asri sebagai tempat bermain anak-anak dan berolahraga	60	50	50	50	45	255	54
69.	Pengetahuan pola perkebunan sangat kurang, perlu adanya pelatihan	50	40	45	40	40	225	60
70.	Posluhan Kelompok Tani belum ada	45	50	40	45	40	220	62
71.	Petugas penyuluh jarang melakukan pembinaan kepada petani, perlu adanya pembinaan dari PPL Pertanian	40	50	45	50	40	230	57
72.	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang	50	45	40	40	40	210	67
73.	Tidak adanya bantuan Bibit tanaman perkebunan dari Pemerintah	45	45	40	40	45	215	64
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI								
1.	Kelembagaan LPMN tentang menggali kurangnya potensi nagari	80	80	60	75	80	375	3
2.	Belum adanya solusi dalam penanggulangan	45	45	40	40	40	210	20

	bencana alam karena belum ada pelatihan							
1.	Event Budaya Tahunan (Kegiatan Festival Randai) belum ada	70	65	60	50	55	300	13
4	Baju Datuk dan Perangkatnya belum lengkap	40	45	40	40	40	205	21
5.	Kurangnya dana dalam rangka memperingati 17 Agustus	70	65	70	70	70	345	7
6.	Kurangnya dana bantuan dalam kegiatan MTQ tingkat Kampung	75	75	70	70	75	365	4
7	Anak-anak muda makin marak mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak mental generasi muda, Perlu pembinaan untuk generasi muda	70	65	60	65	75	335	8
8.	Budaya gotong royong sudah mulai luntur	70	65	65	60	65	325	10
9.	Pelatihan kewirausahaan Pemuda belum ada	45	50	40	45	40	220	18
10.	Sarana/Lapangan Olahraga Folly, Takrau, Badminton dan Futsal belum memadai	75	85	80	80	80	400	1
11.	Kurangnya Sarana dan prasarana Olahraga	70	70	65	60	60	325	11
12.	Lapangan Tenis Meja belum ada	50	55	55	50	50	260	16
13.	Belum adanya lapangan futsal	50	50	40	45	40	225	17
14.	Pengetahuan adat budaya Minangkabau semakin dilupakan, pimpinan adat banyak yang tidak menguasai secara utuh adat dan budaya Minang	45	45	40	45	40	215	19
15.	Kurang efektifnya PKK dalam nagari	80	80	80	70	70	380	2

	pelatihan tanam jagung							
11	sulitnya masyarakat mendapatkan ternak bantuan dari Pemerintah (Sapi Unggul), sehingga masyarakat hanya memelihara ternak masyarakat			80	80	75	235	32
10	Masyarakat sulit mendapatkan bantuan Pengembangan dan pengelolaan Itik			70	60	80	210	37
11	Masyarakat sulit mendapatkan Bantuan Pengembangan dan pengelolaan Ayam pedaging			80	80	70	230	33
12	Belum ada pelatihan kelompok tani dalam pengolahan keramba ikan	45	40	40	40	40	205	38
13	Belum ada pelatihan budidaya ikan air tawar	40	40	40	40	40	200	39
14	Pengetahuan pola pertanian kurang dipahami, produksi masih kurang	60	65	45	40	40	250	31
15	Jerami banyak dibakar petani setelah panen, tidak termanfaatkan dengan optimal perlu adanya pelatihan untuk kelompok tani	70	60	60	60	75	325	15
16	Pengetahuan petani tentang pertanian organik sangat kurang	50	65	65	45	50	275	26
17	Pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu sangat kurang, perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian	80	75	75	60	75	365	7
18	Lahan-lahan sekitar taluk loka masih banyak belum digarap	60	65	60	60	50	295	23

19.	Sering Ternak Masyarakat diserang penyakit, perlu adanya bantuan pakan dan obat-obatan untuk ternak	70	75	70	60	70	345	10
20.	Pengetahuan pola pertanian ramah lingkungan, efektif dan produksi masih kurang	80	85	80	80	75	400	3
21.	Penyuluhan Pertanian kurang terserap baik oleh masyarakat, dan petugas penyuluh pertanian jarang melakukan pembinaan kepada petani. Perlu adanya penyuluhan dari petugas pertanian	80	75	75	60	50	340	11
22.	Kelompok diskusi tentang pertanian tidak ada	60	65	45	50	40	260	30
23.	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat	85	85	90	80	85	425	1
24.	Belum adanya Produk Hukum yang dihasilkan Bamus perlu Pelatihan Bamus	80	75	75	80	80	390	4
25.	Belum adanya Pelatihan Sepeda Motor, Elektronik, perabot bagi pemuda	70	65	60	60	60	315	18
26.	Kurangnya pelatihan Sulaman Bayangan dan Sekolah Kecantikan bagi Ibu-Ibu	70	70	65	65	65	335	12
27.	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos belum ada	60	55	60	60	60	295	21
28.	Pelatihan Pengolahan Batok Kelapa belum ada	70	70	70	60	50	320	16
29.	Pelatihan Pembuatan Gasing belum ada	45	45	45	40	40	215	17

30	Pelatihan Pembuatan Tengkulak atau Saluak belum ada	50	45	45	40	45	225	34
31	Pelatihan Pengolahan Limbah Organik belum ada	60	70	65	70	65	330	14
32	Barang bekas kurang dimanfaatkan, Perlu diadakan Pelatihan Pengolahan sampah/barang-barang bekas	70	70	65	65	65	335	13
33	Ibu-ibu RTM banyak yang menganggur di rumah, Perlu diadakan Pelatihan Menjahit Pola untuk meningkatkan perekonomian	75	75	75	75	70	370	6
34	Kurangnya ilmu life skill ibu-ibu RTM dalam pengolahan ubi kayu	80	75	70	65	70	360	8
35	Keberadaan Lembaga Kredit Mikro Nagari belum mempengaruhi peningkatan usaha-usaha produktif	60	60	65	65	60	310	19
36	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha yaitu kel. PPK, PKK II, PKK III, & II	60	55	55	50	50	270	28
37	Belum munculnya usaha bersama yang dikelola secara kolektif oleh kelompok	65	55	50	60	55	285	24
38	Kelompok SPP belum mandiri dalam pengelolaan modal kelompok, masih butuh pendampingan dan penguatan modal usaha	45	40	45	40	40	210	36
39	Kelompok-kelompok koperasi belum berbadan hukum	45	45	45	45	45	225	35

40	Keberadaan Koperasi di Kampung tidak dapat membantu Warga, tidak ada kegiatan yang dikelola	50	45	50	50	50	245	31
41	Usaha Ekonomi produktif tidak marak muncul di tengah-tengah masyarakat	60	55	50	50	50	265	29
42	BUMNag belum berkembang. Perlu penambahan modal BUMNag.	60	65	60	60	60	305	20
43	Kurang efektifnya BUMNag Nagari dalam usaha Mikro dan lainnya dalam nagari, perputaran modal jadi lambat	75	75	75	65	60	350	9

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

1	Sering terjadi banjir diwaktu hujan, perlu Penanggulangan bencana Banjir dalam keadaan darurat belum ada	70	70	65	60	60	325	2
2	Pengadaan Sembako bagi yang terdampak musibah seperti Banjir, Kebakaran dan Gempa Bumi belum ada	60	60	70	65	60	315	4
3	Pemberian Sembako untuk Keluarga yang mendapat musibah belum ada	60	70	60	70	60	320	3
4	Pemberian bantuan makan pada keluarga yang terkena musibah kematian dan kelaparan belum ada	65	60	60	65	60	310	5
5	Dapur untuk Keadaan Darurat belum ada	75	70	70	60	65	340	1

3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari

Musyawarah Nagari RPJM Nagari dilaksanakan setelah adanya Laporan Hasil Pengkajian Nagari oleh Tim Perumus RPJM. Musyawarah menyepakati beberapa hal diantaranya menyepakati Hasil Pengkajian Nagari, menyepakati Arah Kebijakan Pembangunan Nagari untuk 6 (enam) tahun kepemimpinan Wali Nagari yang mengacu pada Visi dan Misi Wali Nagari.

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1 Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Nagari Tanjung Durian Pasar Baru saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari), maka untuk pembangunan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2024), disusun visi sebagai berikut: **"Terwujudnya Nagari yang mandiri berbasis pertanian, mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera."**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Desa yang mandiri berbasis pertanian

Mengandung pengertian bahwa masyarakat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat Nagari lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal dibidang pertanian secara luas.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.

c. Yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian nagari, seperti jalan, jembatan, irigasi serta infrastruktur strategis lainnya.
5. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

1. Arah Kebijakan

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan empat tujuan didepan, maka arah kebijakan yang diambil antara lain :

- (a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan;

- (b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan dibidang Pertanian,
- (c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian,
- (d) Menguatkan kelompok tani, lembaga mikro untuk modal petani dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat

Misi 2 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tiga tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

- (a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah nagari sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- (b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintah nagari;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan,
- (e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerinatahan nagari yang demokratis,
- (f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

(a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional;

(b) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

(a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;

(b) Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri & pariwisata;

(c) Meningkatkan sarana prasarana kesehatan;

(d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan;

(e) Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Misi 5 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang ditempuh meliputi :

(a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan;

(b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan;

(c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 6 : Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan dua tujuan diatas maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

- (a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
- (b) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam,
- (c) Mewujudkan kondisi wilayah Nagari Tanjung Durian yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.

2. Prioritas Pembangunan Nagari

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018-2024 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama enam tahun kedepan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Perekonomian Nagari

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan
 - a. Pembangunan Betonisasi Jalan;
 - b. Pembangunan Jalan Poros Nagari;
 - c. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman dan Penataan Ruang
 - a. Pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong/talud/bronjong;
 - b. Pembangunan Gapura
3. Program pembangunan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Produksi

- a. Pembangunan kios-kios pemasaran hasil produksi dan hasil kerajinan.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu,
 - b. Perawatan berkala kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu,
 - c. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu,
 - d. Pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk balita.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di polindes.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin,
 - b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
 - c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.
4. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular
 - a. Penyemprotan /fogging sarang nyamuk,
 - b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.

C. Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - a. Pembangunan Gedung Sekolah,
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah,
 - c. Bantuan operasional kegiatan pendidikan.
2. Program Pendidikan Dasar
 - a. Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan
 - b. Pengembangan dan peningkatan pendidikan berbasis agama.
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

- a. Pengembangan sarana prasarana olahraga
- 4. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda
 - a. Pembinaan kelembagaan pemuda,
 - b. Pelatihan Dasar Kepemimpinan,
 - c. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- D. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian Dalam Arti Luas.
 - 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
 - a. Peningkatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dalam arti luas,
 - b. Penyediaan sarana produksi dalam arti luas.
 - 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit
 - a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agribisnis,
 - b. Peningkatan pencegahan hama tanaman pangan.
 - 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, UMKM
 - a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah,
 - b. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah
 - 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.
 - b. Pelatihan keterampilan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.
- E. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
 - 1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur
 - a. Pembangunan Kantor Nagari,
 - b. Pembangunan Gedung-gedung Perkantoran Lembaga Nagari,

- c. Pembangunan Pagar lingkungan perkantoran.
 - d. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer untuk pengolah data.
 - e. Mengadakan reformasi birokrasi.
 - f. Meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
 - g. Menerapkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas.
 - h. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta pemerintah nagari yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
 - b. Peningkatan program komputer untuk olah data kependudukan.
 3. Program Pelayanan Keluarga Berencana
 - a. Peningkatan kegiatan KB mandiri.
 - b. Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial ekonomi.
 4. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya
 - a. Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal.
 5. Program Peningkatan Politik Masyarakat
 - a. Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.
 - b. Peningkatan kapastias kelembagaan BPD.
 - c. Peningkatan pelayanan fungsi BPD.
 6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Nagari
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbagnag.
 - b. Penyusunan perencanaan pembangunan nagari dengan mempertimbangkan aspek gender.
 7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan nagari.

- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek regulasi pengelolaan keuangan nagari.
- 8. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan nagari,
 - b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat,
 - c. Pemberian bantuan operasional lembaga kemasyarakatan
- F. Peningkatan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 1. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Perintisan sarana prasarana pengelolaan persampahan,
 - b. Pelatihan manajemen pengelolaan persampahan.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari disingkat RPJM-Nag adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2024, yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum dan program, disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM-Nag dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nag) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan nagari baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari, pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Nag yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Nagari, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan maju.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Nag dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB-Nag). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Nag Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tahun 2019 – 2024 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Nag yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Nagari.

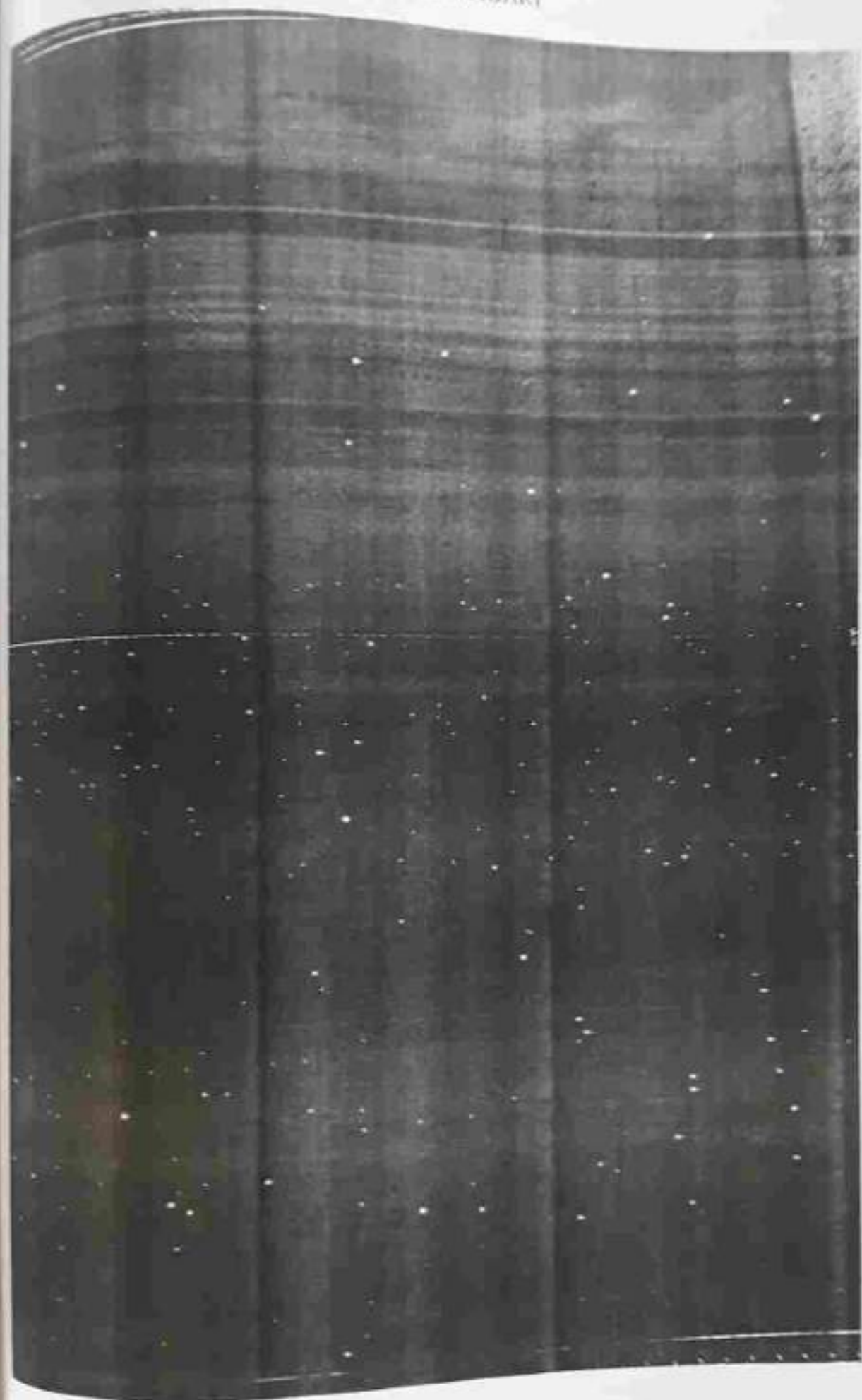
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Nag.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Nag Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tahun 2019 - 2024 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan nagari saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di nagari.

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



PETA SOSIAL NAGARI



KABUPATEN
KENDARI
KABUPATEN
KENDARI

KABUPATEN
KENDARI
KABUPATEN
KENDARI

No	Kategori	Sub Kategori	Indikator Keberhasilan	Sasaran/Manfaat	Peklikas Volume	Lokasi (Kampung)	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Mekanisme Pelaksanaan	Mekanisme Pengawasan	Mekanisme Penilaian
A	Peningkatan Pemertanian Negeri	Sub Bidang	Indikator Keberhasilan	Sasaran/Manfaat	Peklikas Volume	Lokasi (Kampung)	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Mekanisme Pelaksanaan	Mekanisme Pengawasan	Mekanisme Penilaian
A.1	Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Sub Bidang	1. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			2. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			3. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			4. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			5. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			6. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			7. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			8. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			9. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			10. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
A.2	Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Sub Bidang	1. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			2. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			3. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			4. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			5. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			6. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			7. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			8. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			9. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023
			10. Peningkatan Tetap dan Tunjangan dan Operasional	Peningkatan Kinerja Pemerintah Negeri	72 Bulan	Negeri	2019	2020	2021	2022	2023

No.	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Periode Waktu	Sasaran/Masyarakat	Tahun Pelaksanaan						Anggaran (Rp) Tahunan	Sumber	Indikator Keberhasilan					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	
			3. Pembangunan Area Parkir Kantor Nagari	Nagari	1 Paket	Perawatan Aset Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
			4. Pembangunan Nya Ronda	Nagari	3 Unit	Perawatan Aset Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓	✓	✓		
			5. Pembangunan Pagar Kantor	Nagari	1 Paket	Perawatan Aset Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag/ APBD/ Dana Lainnya	✓	✓	✓		
A.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1. Pelayanan Umum	Nagari	72 Bulan	Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
		b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari	1. Pengolahan Informasi/Profil Nagari	Nagari	12 kali	Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
			2. Pembuatan Papan Monografi Nagari	Nagari	2 Kali/tahun	Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓	✓	✓		
			3. Papan Pengumuman/ Informasi Nagari	Nagari	5 Unit	Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBNag	✓	✓	✓		
			4. Pembuatan Sistem Informasi Nagari Berbasis IT	Nagari	1 Paket	Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓	✓	✓		
			c. Kegiatan Lainnya	1. Pendaftaran dan Registrasi Rumah Penduduk	Nagari	6 Tahun	Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓	✓	✓	
			A.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari	1. Musyawarah Nagari	Nagari	5 tahun	Transparansi Kegiatan Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBNag	✓	✓	✓
			b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	1. Penyusunan RPJM Nagari	Nagari	1 Kali/Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBNag	✓	✓	✓	
2. Review Kegiatan Penyusunan RPJM Nagari	Nagari	1 Kali/Tahun		Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBNag	✓	✓	✓				
3. Penyusunan RKP Nagari	Nagari	1 kali/Tahun		Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBNag	✓	✓	✓				
c. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag, APBDnag, Perubahan, LPI APBDnag, dll)	Nagari	1 kali/Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBNag	✓	✓	✓				
	d. Penyusunan Kebijakan Nagari	1. Penyusunan kebijakan Nagari (Permreg, Perwase)	Nagari	1 Kali/Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
e. Penyusunan Laporan Wali Nagari	1. Penyusunan Laporan Wali Nagari (LPPD Akhir Tahun, LPPD Akhir Masa Jabatan, Laporan Akhir Tahun Anggaran)	Nagari	1 Kali/Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
	f. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Bina Musyawarah Antar Nagari	Kecamatan	6 kali	Transparansi Pembangunan dan Kegiatan antar Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
g. Pelaksanaan dan Sosialisasi Pihawa dan Pemilihan Bamsud	1. Bina Kegiatan Pemilihan Wali Nagari	Nagari	1 kali	Demokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
	2. Bina Kegiatan Pemilihan Bamsud	Nagari	1 Kali	Demokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBNag	✓	✓	✓			
h. Penyelenggaraan Lomba	1. Partisipasi Lomba Nagari	Nagari	6 kali	Mencari Bakat Masyarakat dan Mempersatukan Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag/ APBD/ Dana Lainnya	✓	✓	✓			

No	Program	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kampung)	Frekuensi (tahun)	Bentuk Kegiatan	Tahun Pelaksanaan										Keterangan	Anggaran (Rp)	Status	Catatan
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
A.2	Peningkatan dan Penguatan Berbasis Masyarakat	Peningkatan dan Penguatan Berbasis Masyarakat	Peningkatan dan Penguatan Berbasis Masyarakat	Negeri	3 Kali	Peningkatan dan Penguatan Berbasis Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
B.1	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Negeri	72 Bulan	Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
B.2	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Negeri	72 Bulan	Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	✓	✓

No	Bidang	Sub-Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kampung)	Perkiraan Volume	Sarana/Media	Tahun Pelaksanaan						Kategori Biaya		Kategori Biaya		Keterangan
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	Salinan (Rp. Tahun)	Salinan	Salinan (Rp. Tahun)	Salinan	
			2. Bantuan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Muslim	Nagari	6 Tahun	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
		b. Penyelenggaraan Posyandu	1. Bantuan PMT Gigi Balita	Nagari	72 Bulan	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
			2. Bantuan PMT Gigi Lansia	Nagari	72 Bulan	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
			3. Penyuluhan Ibu Hamil	Nagari	6 Tahun	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓		
			4. Kesejahteraan Honor Kader Posyandu	Nagari	72 Bulan	Peningkatan Taraf Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		c. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1. Pelatihan Penyuluhan Kesehatan	Nagari	36 kali	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓		
		d. Penyelenggaraan Desa Siaga	1. Kesejahteraan Honor Kader Nagari Siaga	Nagari	72 Bulan	Peningkatan Taraf Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	APBNag	✓		
			2. Pelatihan Kader Nagari Siaga	Nagari	6 kali	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBNag	✓		
			3. Bantuan Mobil Ambulans	Nagari	2 unit	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBNag/APBN/PMU/ lain	✓		
		e. Pembangunan/ Rehabilitasi / Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu, Polindes	1. Pembangunan Gedung Posyandu	Nagari	2 Unit	Sarana Kesehatan			✓			✓	100.000.000	APBNag	✓		
			2. Pembangunan Gedung Polindes	Nagari	6 Tahun	Sarana Kesehatan		✓					150.000.000	APBNag	✓		
		f. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes	1. Pengadaan alat-alat Kesehatan Polindes	Nagari	6 Tahun	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
			2. Pengadaan alat-alat Penunjang Kegiatan Posyandu	Nagari	6 Tahun	Sarana Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
		g. Kegiatan Lainnya	1. Kesejahteraan Kader KB	Nagari	72 Bulan	Peningkatan Taraf Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
			2. Kesejahteraan Kader-kader lainnya yang ada di Nagari	Nagari	72 Bulan	Peningkatan Taraf Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBNag	✓		
			3. Kesejahteraan Tutor Gemas	Nagari	72 Bulan	Peningkatan Taraf Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
B.3	Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	a. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari	1. Pemeliharaan Gapura	Kamp Labuh	1 Unit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		b. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	1. Pembangunan Jalan Nagari	Nagari	6000 M	Kelancaran Transportasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000.000	APBNag/APBN/PMU/ lain	✓		
			2. Pembangunan Jembatan Evakuasi Tsunami	Kamp Lubuk Bay	1 Unit					✓			500.000.000	APBNag/APBN/PMU/ lain	✓		
			3. Rehabilitasi Jembatan/Plat Over/ter	Nagari	5 Unit	Kelancaran Transportasi	✓		✓	✓			50.000.000	APBNag	✓		
			4. Pembangunan Pengamanatan Tebing Sungai	Kamp Lubuk Bay	1000 M	Mengatasi Longsor		✓					800.000.000	APBNag/APBN/PMU/ lain	✓		
		c. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Mili Nagari	1. Normalisasi Batang Bayang	Kamp Lubuk Bay		Mengatasi Banjir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000.000	APBNag/APBN/PMU/ lain	✓		
			2. Pembangunan Saluran Irigasi	Nagari	6000 M	Kelancaran Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	APBNag	✓		

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kampung)	Perkiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Kategori (Bagi Pembiayaan)	Sumber	Kategori (Bagi Pembiayaan)		
							2018	2019	2020	2021	2022	2023			18	19	20
Kebudayaan dan Keagamaan	a. Kebudayaan dan Keagamaan	2	Bantuan Pempekaan Pw Keselamatan Bencana	Negeri	6 Tahun	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		1	Bantuan Keterbacaan EAN	Negeri	6 Tahun	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APBNag	✓		
		2	Bantuan Dana Kegiatan Festival Rendai antar Kabupaten	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		3	Pengadaan Kegiatan Lomba 17 Agustus	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓		
		4	Bantuan Biaya Pengadaan Lomba MTQ Tingkat Kampung	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓		
		5	Peningkatan Ntal Keagamaan	Negeri	6 Tahun	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		6	Peningkatan Misi-misi Kebangsaan	Negeri	6 Tahun	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
Keperibaduan dan Olah Raga	a. Keperibaduan dan Olah Raga	7	Bantuan Sarana Prasarana Melejit Taklim	Negeri	1 Kali	Stimulan Lembaga Sosial			✓				20.000.000	APBNag	✓		
		1	Pembinaan Bahaya Narkoba	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓		✓			✓	30.000.000	APBNag	✓		
		2	Pembinaan Kerang Tarsusa/ Bismu...	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
		3	Bantuan Dana Kegiatan Turnamen Bola Kaki, Bola Voli, Badminton, dll	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		4	Operasional Kegiatan Pemuda Olahraga	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Voli	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Badminton	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Sepak Takraw, Futsal, dll	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBNag	✓		
		8	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Negeri	6 Tahun	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBNag	✓		
Perencanaan Masyarakat	a. Keterbacaan Masyarakat	9	Pengadaan Lapangan Olah Raga	Negeri	3 Paket	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBNag	✓		
		1	Bantuan Lembaga Adat	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		2	Bantuan Keterbacaan LPMN	Negeri	72 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		3	Bantuan Keterbacaan PKK	Negeri	72 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		4	Bantuan Negeri Siga	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		5	Bantuan PHB	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		6	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
		7	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBNag	✓		
		8	Bantuan PHB	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		10	Pembinaan Kelompok Tani	Negeri	6 Kali	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		12	Bantuan Baku Tani	Negeri	300 Buah	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBNag	✓		
		13	Bantuan Airgum	Negeri	300 Buah	Stimulan Lembaga Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBNag	✓		

No	Bidang / Jenis Kegiatan						Waktu Pelaksanaan						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Peningkatan Kapasitas Masyarakat			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (Kampung)	Perkiraan Volume	Sasaran/Manfaat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah (Rp) Tahun	Sumber	Dana	Anggaran	Anggaran	
			14	Bantuan Seragam Masjid Taklim	Negeri	3 Kali	Stimulus Lembaga Sosial											
			15	Pengabdian Kegiatan Pengabdian umum Hari-hari Besar	Negeri	12 Kali	Stimulus Lembaga Sosial							50.000.000	APBNag			
														50.000.000	APBNag			
D	Pemberdayaan Masyarakat																	
D.1	Kelautan dan Perikanan	a. Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Keramba Ikan	Kamp. Lubuk Bay	6 Kali	Kesejahteraan Taraf Hidup							100.000.000	APBNag			
			2	Pemeliharaan Keramba Ikan	Kamp. Lubuk Bay	12 Kali	Kesejahteraan Taraf Hidup							50.000.000	APBNag			
			3	Bantuan Bibit Ikan	Kamp. Lubuk Bay	12 Kali	Kesejahteraan Taraf Hidup							50.000.000	APBNag			
			4	Pelatihan TTG Ternak Kelautan dan Perikanan	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
	Pertanian dan Perikanan	a. Pertanian dan Perikanan	1	Bantuan Alat Pertanian	Negeri	3 Paket	Kesejahteraan Taraf Hidup							100.000.000	APBNag/APBN/DAU Lain			
			2	Bantuan Pompa Air	Negeri	6 Bh	Kesejahteraan Taraf Hidup							100.000.000	APBNag/APBN/DAU Lain			
			3	Pelatihan TTG Ternak Pertanian dan Perikanan	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			4	Bantuan Bibit Penger dan Ternak	Negeri	6 Kali	Kesejahteraan Taraf Hidup							50.000.000	APBNag			
			5	Pelatihan Kelompok Tani	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri	a. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Negeri dan Keterampilan	1	Pelatihan Wali Negeri dan Perangkat	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							130.000.000	APBNag			
			2	Pelatihan BRD	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							100.000.000	APBNag			
			3	Pelatihan LPMN	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							100.000.000	APBNag			
			4	Pelatihan PKK	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							100.000.000	APBNag			
			5	Pelatihan Karangmuda	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			6	Pelatihan Pertanian	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			7	Pelatihan Perikanan	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			8	Pelatihan Perkebunan	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			9	Pelatihan Perikanan	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			10	Pelatihan Jaitu-Bordir	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			11	Pelatihan Home Industri	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							80.000.000	APBNag			
			12	Pelatihan Kader	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							80.000.000	APBNag			
			13	Pelatihan Persejahteraan	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							80.000.000	APBNag			
			14	Pelatihan Sistem Informasi Negeri	Negeri	12 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			15	Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MGA/ PAUD	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							80.000.000	APBNag			
			16	Pelatihan Kelompok Perempuan	Negeri	6 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			17	Pelatihan Rias Pengantin/Busana	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							100.000.000	APBNag			
			18	Pelatihan Motor Elektro	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			
			19	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Negeri	6 Tahun	Peningkatan Kapasitas							70.000.000	APBNag			
			20	Pelatihan Tata Boga	Negeri	3 Kali	Peningkatan Kapasitas							50.000.000	APBNag			



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

Alamat: Jln. Sumur Gadang Tj. Durian Ps. Baru – Asam Kamba Kode Pos: 25652

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RPJM NAGARI**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Nagari di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Nagari, maka pada hari ini :

Hari / tanggal : Kamis / 28 Juni 2018
Jam : 13.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Tim Perumus RPJM Nagari oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan Wakil Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan :

1. Pembentukan Tim Perumus RPJM,
2. Sosialisasi RPJM Nagari dan Pelatihan Tim Perumus,
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL).

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah nagari menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir yaitu :

1. Ketua : Yulianti, S.Kom
2. Sekretaris : Mek Roza
3. Anggota :
 1. Mimi Marlina
 2. Ori Supriadi
 3. Syafri
 4. Gusrial
 5. Joni Afrianto

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanjung Durian, 28 Juni 2018

Ketua BPD


HARDIMEN, S.Pd

Wakil / Tokoh Masyarakat


(.....)
INDRA

DAFTAR HADIR

Hari
Tanggal
Acara

Kamis
28 Juni 2018
Pembentukan Tim Perumus RPJM Nagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ADNAN PIRK BANGKAP	Wk kat. Bonmus	1	2
2	LUS RUL	Manajemen	3	4
3	SARA HT	Anggot. Bonus	5	6
4	M. S. M. M.	Manajemen	7	8
5	PINIL		9	10
6	FIRI SUSILAWATI		11	12
7	ISMAYENI		13	14
8	di Harau-pati	Bonay	15	16
9	Epiat	Manajemen	17	18
10	INDRA PRATIKA	Manajemen	19	20
11	Waldemar	POP	21	22
12	Syafri	Pemuda	23	24
13	MERY		25	26
14	ORI SUPRIADI		27	28
15	Syahrizal			
16	DESWANTRI			
17	JONI AFRIANDU			
18	GUS RITA			
19	YONORISOL	K. Emp. Lb. Bay		
20	RAFLIS			
21	RIKA			
22	RETA			
23	YERNING SIN			
24	JM			
25	ILHAM SATHIA			
26	Dian Mardian			
27	MEMORA S.			
28	ME FROZA	K. PEMUDA		

29	Mega Lili Sari	Megawati	29	Jed	30	Jed
30	LIDRA	- 12 -	31	Jed	32	Jed
31	HERAWATI	- 11 -	33	Jed	34	Jed
32	MELMOWATI	- 11 -	35	Jed	36	Jed
33	GUSMANTO	KORPRIKORPRI	37	Jed	38	Jed
34	SABARNI BAKHTAR	PLD	39	Jed	40	Jed
35	MIMI MARLINA	Kaur. Parganamon	41	Jed	42	Jed
36	ROSI GUSMANTRI	Kaur. Parganamon	43	Jed	44	Jed
37	VICTOR	LABUR	45	Jed	46	Jed
38	PERMUDA	M. Polan	47	Jed	48	Jed
39	EDISON	W. N.	49	Jed	50	Jed
40	Hongki Sapi Yoko	Kor. Pm	51	Jed	52	Jed
41	ANARDIAN		53	Jed	54	Jed
42	YULIANI	STRAAG	55	Jed	56	Jed
43	BUCI IKHWANA	TJ. Curiat	57	Jed	58	Jed
44	HARDINAN	TJ. Purian	59	Jed	60	Jed
45			61	Jed	62	Jed
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI)
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2019-2024

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2012-2017 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2019-2024;
 - Bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru 2019-2024 perlu membentuk Tim Penyusun;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari;
 11. Surat Edaran Bupati pesisir Selatan No 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Mengenai Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI) NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN 2019-2024;
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 - c. Melakukan penjarangan aspirasi masyarakat Nagari;
 - d. Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka

KEEMPAT

Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Durian
Pada tanggal 28 Juni 2018

Wali Nagari
Tanjung Durian Pasar Baru



Penyusunan kepada:

1. Bupati Pangasinan di Pangasinan,
2. Camat Bayang di Pangasinan,
3. Ketua BKKBN Nagari Tanjung Durian Pasar Baru di Tanjung Durian,
4. Anggota Tim Penyusunan yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Nomor

Tanggal : 28 Juni 2018

Tentang : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun 2018-2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM NAGARI)

NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU TAHUN 2018-2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YULIANTI	Kamp. Marapalam	Sekretaris Nagari	Ketua
2	MEKROZA	Kamp. Lubuk Bay	LPMN	Sekretaris
3	MIMI MARLINA	Kamp. Labuh	Perangkat Nagari	Anggota
4	ORI SUPRIADI	Kamp. Labuh	Pemuda	Anggota
5	SYAFRI	Kamp. Lubuk Bay	Ninik Mamak	Anggota
6	GUSRIAL	Kamp. Marapalam	Kader Pemberdayaan	Anggota
7	JONI AFRIANTO	Kamp. Labuh	Kader Teknik	Anggota



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada

Hari/ tanggal : Kamis / 23 Agustus 2018

Jam : 13.30 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari di Kampung Labuh yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Kampung, Warga Kampung, tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sketsa Nagari
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Kalender Musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 23 Agustus 2018

Mengetahui,
Wali Nagari



EDISON

Ketua

Tim Penyusun RPJM Nagari

YULIANTI, S.Kom

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari/tanggal : Kamis / 23 Agustus 2018

Jam : 13.30 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari Kampung Marapalam yang dihadiri oleh wakil-wakil dan kelompok, Kepala Kampung, Warga Kampung, tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah :

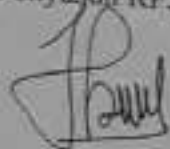
1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sketsa Nagari
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Kalender Musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 23 Agustus 2018

Ketua

Tim Penyusun RPJM Nagari



YULIANTI, S.Kom

Mengetahui,
Wali Nagari



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada:

Hari/ tanggal : Kamis / 23 Agustus 2018

Jam : 13.30 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari

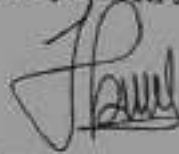
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari Kampung Lubuk Bay yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Kepala Kampung, Warga Kampung, tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Sketsa Nagari
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Kalender Musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 23 Agustus 2018

Ketua
Tim Penyusun RPJM Nagari



YULIANTI, S.Kom



DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 23 Agustus 2018
 Acara : Pelaksanaan Penetapan Keadaan Nagari

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	MEL CHANIA	TAUSUNG DURIAN	1. Mel	2. [Signature]
2	NIKE ARIZAL NURTANAH	TJ. DURIAN	3. [Signature]	4. [Signature]
3	MEMDRA S.	- 12 -	5. [Signature]	6. [Signature]
4	KASMAWATI	- 11 -	7. [Signature]	8. [Signature]
5	GUSTMALA SARI	- 11 -	9. [Signature]	10. [Signature]
6	DESWANTRI	- 11 -	11. [Signature]	12. [Signature]
7	ANI	- 11 -	13. [Signature]	14. [Signature]
8	NEWENG KURNIAWATI	- 11 -	15. [Signature]	16. [Signature]
9	INDRA YENI	- 11 -	17. [Signature]	18. [Signature]
10	AYU ERA RITA	- 11 -	19. [Signature]	20. [Signature]
11	JONI APRIANTO	- 11 -	21. [Signature]	22. [Signature]
12	WINGKI FERNANDO	- 11 -	23. [Signature]	24. [Signature]
13	EFENDI	- 11 -	25. [Signature]	26. [Signature]
14	TRI SUSANTI, SH.	- 11 -	27. [Signature]	28. [Signature]
15	SYAM FIMILIA	- 11 -	29. [Signature]	30. [Signature]
16	YARNGLI	- 11 -		
17	REZA	- 11 -		
18	HAN DITANI	- 11 -		
19	MURLI	- 11 -		
20	EPIS	- 11 -		
21	ADNAN PUL R. GARYAT	- 11 -		
22	RIRIN	- 11 -		
23	TUSRI KAMPAN	- 11 -		
24	[Signature]	- 11 -		
25	AGUSLI	- 11 -		
26	GUSRIAL	- 11 -		
27	YUNIAR	- 11 -		
28	DEA GUNAWATI	- 11 -		
29	YUSHEMI	- 11 -		
30	DIFAN MARDIAN	- 11 -		

31.	ZURMAINI	LUBUK BAY	31		32	
32.	YUSNI	Labuh				
33.	Zahar Marlana Afir	Labuh	33		34	Cukir
34.	Genta	Tj. Durian				
35.	Sri darmawanti	Tj. Durian	35		36	Dut
36.	DARI Guslianti	Tj. Durian				
37.	JUNESPI	Tj. Durian	37		38	Set
38.	JASMANI	- 1 -				
39.	SRIMAYENTI	- 1 -	39		40	Set
40.	LUCI RAHMADANI	LABUH				
41.	WIRA WATI	marafalan	41		42	
42.	SUQFI					
43.	JYAHRIACEHAN		43		44	
44.	Gusrianto	L. Bay				
45.	ERNI	L. BAY	45		46	
46.	ENI FRITA					
47.	YUSMARIANI		47		48	
48.	ERMITA					
49.	DELMIAFI	2 Bay	49		50	
50.	ANDI	- 1 -				
51.	Syainal	- 1 -	51		52	
52.	SUSRITA					
53.	ANDI	T. Durian	53		54	
54.	FITRIANI	Tj. Durian				
55.	MEEROZA	L3. Bay	55		56	
56.	Julianti	marafalan				
57.	Akris Iman Kato	Lubuk Bay	57		58	
58.	Nova Dahlia	Tj. Durian / Labuan				
59.	Pisangau	Idam	59		60	
60.	Mardiana					
61.	Yusfrima	Labuh	61		62	
62.	CEALIS					
63.	ZURMANA	2. BAY	63		64	
64.	WIRA	"				
65.	EMI		65		66	
66.	ZUKAIDI	Tj. Durian				
67.	YONDRIZA		67		68	
68.	ERMAWATI	Tj. Durian				

69	RUSVITA	Tj Durian	69		70	
70	PURDI	Tj Durian	71		72	
71	SUSMITA	- " -	73		74	
72	Eka Ulan Sari	Tj. Durian	75		76	
73	MASRI		77		78	
74			79		80	
75	YUSRI KALI		81		82	
76	Rahmat Hidayat		83		84	
77	FINA		85		86	
78	HIDAYATI		87		88	
79			89		90	
80			91		92	
81	ALIL MUKMININ		93		94	
82	HIKAWATI		95		96	
83	WIPARITA		97		98	
84	NOTRIADI		99		100	
85	FITRIA SULASTRI		101		102	
86	SUPRI		103		104	
87	SUGARDAI		105		106	
88	EKA ZARMIATI					
89	IRISWATI					
90	GUSTI ANGGI PRABOWO					
91	AHMAD AFDALI					
92	SRI HERMIYENTI					
93	YUNDI FRIZAL					
94	YENI DESWITA					
95	HANGKI SRI YANTI					
96	KUNTU ILAHI					
97	VERY ETS KANDAS					
98	YULIANI					
99	MIMI MARLINA					
100	ROSI GUSMANEH					
101	YUSMANTO					
102	EDISON					
103						
104						
105						
106						

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI

DAFTAR GAGASAN PER KAMPUNG

TANJUNG DURIAN PASAR BARU
BAYANG
PESISIR SELATAN
SUMATERA BARAT

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A RTM
1	Pembangunan Gedung TK / PAUD	Nagari Tj. Durian	1	unit	15	15	20
2	Bantuan Siswa Miskin (Beasiswa)	Nagari Tj. Durian	150	orang			150
3	Penyediaan Honor Guru MDA/TPA/TPSA/Guru Irama	Nagari Tj. Durian	10	orang	4	6	
4	Pelatihan Sepeda Motor, Elektronik, perabot	Nagari Tj. Durian	50	orang	15	20	15
5	Saluran Bayangan dan Sekolah Kecantikan bagi ibu-ibu	Nagari Tj. Durian	120	orang	45	35	40
6	Transport Guru/Ustad untuk kegiatan Majelis ta'lim tiap kampung	Nagari Tj. Durian	80	orang		40	40
7	Honor Imam dan Garin Masjid	Nagari Tj. Durian	8	orang	8		
8	Pembangunan/Renovasi Bangunan MDA Masjid Al-Kasyaf	Kampung Lb. Bay	1	unit	20	35	15
9	Pengadaan Sarana Prasaran Olahraga	Kampung Lb. Bay	1	Paket	30	30	50
10	Pelatihan Pembacaan Khutbah	Nagari Tj. Durian	50	orang	15	20	15
11	Pelatihan Pupuk Kompos	Kampung Marapalam	200	orang	40	35	125
12	Pelatihan Pengolahan Batok Kelapa	Kampung Lb. Bay	60	orang	15	20	25
13	Pelatihan Pembuatan Gasing	Kamp. Lubuk Bay	50	orang	30	10	10
14	Pelatihan pembuatan Tengkulak atau saluk	Kamp. Lubuk Bay	50	orang	30	10	10
15	Pelatihan pengolahan limbah organik	Kamp. Lubuk Bay	150	orang	50	30	70
16	Pelatihan Pengolahan sampah/barang-barang bekas	Kampung Lb. Bay	90	orang	30	20	40
17	Pelatihan Menjahit Pola	Nagari Tj. Durian	120	orang	50		70
18	Pengembangan industri rumahan dari tumbuhan (Ubi Kayu dan lain2)	Kamp. Labuh	80	orang	40	10	30
19	Bantuan Alat-alat kesehatan Poskesri	Nagari Tj. Durian	150	orang	50	50	50
20	Bantuan Ala-alat penimbangan Posyandu	Nagari Tj. Durian	80	orang	30	35	15
21	Transport Kader Posyandu ditingkatkan	Nagari Tj. Durian	15	orang		10	5
22	PMU untuk anak balita, ibu hamil, dan Lansia	Nagari Tj. Durian	80	orang	30	35	15
23	Pakaian seragam kader-kader	Nagari Tj. Durian	15	orang		10	5
24	Tempat Posyandu yang layak tiap Kampung	Nagari Tj. Durian	3	unit	15	20	35
25	Transport Kader Nagari Siaga, PTM dan Puskesmas ditingkatkan	Nagari Tj. Durian	15	orang		10	5
26	PMU untuk anak kurang gizi	Nagari Tj. Durian	40	orang	15	10	15
27	Transport Tutor Germas	Nagari Tj. Durian	90	orang	30	30	30
28	Pengadaan senam Lansia sekaligus pemberian makan tambahan	Kamp. Labuh	30	orang	10	10	10
29	Peningkatan Bantuan PKH	Nagari Tj. Durian	60	orang			60
30	Saluran pengkuran ujung tanah menuju kuburan	Kamp. Labuh	200	meter	100	115	80

Pembukaan Jalan Baru sambungan Gang Bayang ke Perumnas	Kamp. Labuh	250	meter	150	100	90
Rabat Beton Jalan Samping Rumah si Nas ke Jalan Baru	Kamp. Labuh	500	meter	200	90	90
Pembukaan Jalan Baru depan Gang Rang Bayang ke Jalan Baru	Kamp. Labuh	100	meter	180	120	150
Pengadaan Sarana/Lapangan Olahraga Folly, Tiarau, Badminton dan Futsal	Kamp. Labuh dan Lubuk Bay	3	unit	80	60	90
Irigasi dari Jalan Baru ke Tanah Sarik	Kamp. Labuh	600	meter	120	100	150
Pembangunan Pos Pemuda/Pos Ronda dan penengkapannya	Kamp. Labuh	3	unit	80	60	90
Sambungan irigasi ujung tanah ke mushala	Kamp. Labuh	177	meter	100	100	80
Normalisasi jalan sumur gadang	Kamp. Marapalam	550	meter	90	80	100
Latihan Pembukaan Jalan Baru dari Polindes ke SMA 2 Bayang	Kamp. Marapalam	300	meter	100	130	120
Pengulangan Rabat Beton Jalan tiga ruang sampai ke Kantor Wali Nagari	Kamp. Marapalam	350	meter	100	80	90
Pembukaan Jalan Baru dari Tiga ruang ke Lahan sawah	Kamp. Marapalam	100	meter	80	90	60
Rehabilitasi jalan ujung gurun	Kamp. Marapalam	350	meter	150	160	100
Penempatan/Lampu Jalan Nagari	Kamp. Marapalam	100	unit	150	160	200
Penyediaan alat-alat kematian/jenazah (Tenda, Diesel, Keranda, Tempat pemandian jenazah, Gunting, Baskom, Kursi, dll)	Kamp. Marapalam	1	Paket	200	200	200
Sewa tanah untuk lapangan Futsal	Nagari Tj. Durian	1	paket	80	70	50
Pembangunan Bronjong Jalan Ujung Gurun	Kamp. Marapalam	1	paket	80	90	70
Normalisasi Batang Bayang	Kamp. Lubuk Bay	600	meter	70	60	100
Saluran Irigasi (SDN 19) ke Buah Kubang (Kiri-Ranas)	Kamp. Lubuk Bay	500	meter	120	80	90
Tanjutan Pembangunan Drainase simpang empat ke Ujung Tanah	Kamp. Lubuk Bay	600	meter	90	80	100
Pembukaan Jalan Rumah Sawah sampai ke SD 19 (Jalan lingkaran rumah sawah)	Kamp. Lubuk Bay	400	meter	100	80	70
Jalan lingkaran buah kubang ke simpang empat	Kamp. Lubuk Bay	200	meter	90	60	50
Pembukaan Jalan dari SDN 19 ke Lubuk Batu	Kamp. Lubuk Bay	250	meter	80	60	70
Pembangunan Pagar SDN 19 Tanjung Durian (permanen)	Kamp. Lubuk Bay	1	Paket	70	80	50
Pondasi Pembangunan Kantor Wali Nagari Tanjung Durian	Nagari Tj. Durian	1	Paket	100	150	200
Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari Tanjung Durian	Nagari Tj. Durian	1	paket	80	90	100
Pembangunan Tempat Parkir Kantor Wali Nagari Tanjung Durian	Nagari Tj. Durian	1	paket	80	90	100
Sambungan Irigasi dari Cuculan ke Bariyang	Kampung Marapalam	600	meter	100	120	140
Sumbangan Dana untuk PHBN dan PHBI	Nagari Tj. Durian	1	Paket	80	60	50
Pengadaan Lapangan Tenis Meja	Kamp. Labuh	3	unit	60	70	50
Sumbangan MCK Keluarga Miskin tiap kampung	Nagari Tj. Durian	45	orang	15	15	15
Sumbangan Rumah Tidak Layak Huni	Nagari Tj. Durian	12	orang			12
Sumbangan Rumah Tidak Layak Huni	Nagari Tj. Durian	20	unit	8	6	6
Sumbangan tempat sampah	Nagari Tj. Durian	60	orang	15	10	35
Sumbangan air bersih	Nagari Tj. Durian	1	paket	15	20	30
Sumbangan alat pemisahan sampah	Nagari Tj. Durian					

65	Pengadaan Alat-alat kesenian randai	Kampung Labuh	50	orang	15	20	15
66	Pengadaan Pakaian tari	Kampung Labuh	50	orang	15	20	15
67	Latihan Adat dan Budaya Minang	Nagari Tj. Durian	30	orang	10	10	15
68	Alat-Alat Kesenian untuk Majelis Ta'lim	Nagari Tj. Durian	90	orang	330	30	30
69	Event Budaya Tahunan	Nagari Tj. Durian	1	paket	150	100	200
70	Penambahan Modal BUMNag	Nagari Tj. Durian	1	paket	100	90	200
71	Bantuan Pompa Air	Nagari Tj. Durian	3	unit	80	60	100
72	Bantuan Mesin Bajak Sawah	Nagari Tj. Durian	3	unit	90	120	100
73	Bantuan Mesin Perontok Padi	Nagari Tj. Durian	3	unit	90	120	100
74	Latihan Pola Tanam Padi	Nagari Tj. Durian	3	paket	90	120	100
75	Latihan pengolahan Jerami	Nagari Tj. Durian	3	paket	90	80	60
76	Bantuan Pupuk Bersubsidi	Nagari Tj. Durian	10	paket	80	70	100
77	Bantuan benih Padi Unggul	Nagari Tj. Durian	10	paket	100	120	90
78	Pengembangan dan pengelolaan Ayam pedaging	Nagari Tj. Durian	1.000	ekor	10	10	10
79	Bantuan Sapi Unggul	Nagari Tj. Durian	60	ekor	15	20	15
80	Bantuan Pengembangan dan pengelolaan Itik	Nagari Tj. Durian	1.000	ekor	30	30	30
81	Bantuan Perlengkapan dan Bibit ikan dan udang	Nagari Tj. Durian	3	paket	20	30	15
82	Pengadaan Sembako bagi yang terdampak musibah, Banjir, Kebakaran dan Gempa Bumi	Nagari Tj. Durian	1	unit	20	20	15
83	Pendirian Dapur keadaan Darurat	Nagari Tj. Durian	50	Paket	40	50	30
84	Pemberian sembako kepada KK yang terdampak musibah	Nagari Tj. Durian	50	Paket	50	30	20
85	Pemberian bantuan makan pada KK yang terkena musibah kematian dan kelaparan	Nagari Tj. Durian	50	Paket	80	90	100
86	Penanggulangan bencana Banjir dalam keadaan darurat	Kamp. Marapalam	50	Paket	60	80	120
87	Peningkatan Koperasi dan Usaha Masyarakat						

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

Nagari : Tanjung Durian Pasar Baru
Kecamatan : Bayang
Kabupaten : Pesisir Selatan
Provinsi : Sumatera Barat

1. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Nagari adalah ketersediaan RPJM Nagari dan RKP Nagari. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Nagari. Maka kualitas RPJM Nagari dan RKP Nagari menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen RPJM Nagari.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Nagari
- Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Nagari
- Pengkajian Permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Nagari

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari dengan dipandu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

4. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MN (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari)

5. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Kelembagaan

6. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk mengemukakan peluang pendayagunaan sumber daya nagari
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat\

7. Hasil

- 1. Data Nagari yang sudah diselenggarakan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Nagari
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan pernagari
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Kampung dan/atau kelompok masyarakat.

8. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan nagari.

Tanjung Durian,

2018

Mengetahui,
Wali Nagari



Ketua

Tim Penyusun RPJM Nagari

Yulianti, S.Kom

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RPJM Nagari di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari / Tanggal : Jumat/ 21 September 2018

Jam : 13.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Kantor Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, Unsur Perangkat Nagari, Bamus, Wakil-wakil kelompok masyarakat. Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penjelasan proses Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
2. Penjelasan mengenai prioritas usulan kegiatan
3. Penjelasan materi Rancangan RPJM Nagari
4. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan Rancangan RPJM-Nagari

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: HARDIMEN, S.Pdi	dari	Ketua Bamus
Notulen	: Yulianti, S.Kom	dari	Sekretaris Nagari
Nara sumber	: Indra Painata	dari	Pendamping Desa
	Syafnil Syarif, S.Pd	dari	TPID

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari yaitu :

1. Menyepakati RPJM yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagai dasar dalam waktu 6 (enam) tahun kedepan
2. Menyepakati bahwa dalam pelaksanaan semua kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nagari akan memberdayakan semua tenaga kerja yang ada di nagari

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 21 September 2018

Ketua Bamus


HARDIMEN, SPd

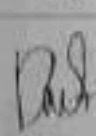
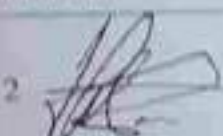
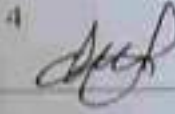
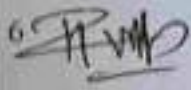
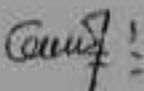
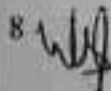
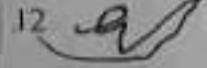
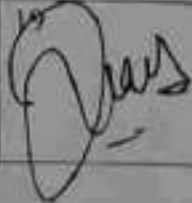
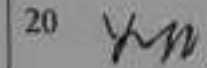


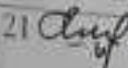
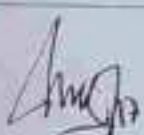
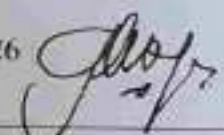
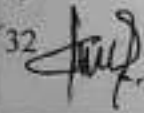
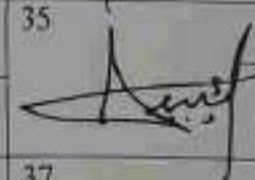
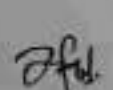
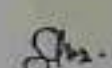
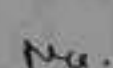
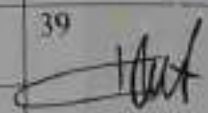
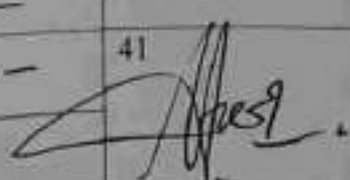
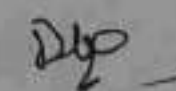
Wakil Masyarakat


(Muslim)

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 21 September 2018
 Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anggaran 1 /
Penyusunan Rancangan RPJMN Negeri

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	DANI GUSLIANTI	P	Kend Labuh	1	
2	MUS LILIS	L	.. Marapala	2	
3	RINA	P	Lubuk Bay	3	
4	AFRIZAL	L	64B415 BG	4	
5	FITRIANI	P	-	5	
6	ROSY	P	-	6	
7	UPIK	P	Marapalam	7	
8	WIRAWATI	P	MARAPALAM	8	
9	IDALFITRA	L	- ..	9	
10	NENENE KURNIAWATI	P	- ..	10	
11	SUSRITA	P	Kampung Jauh	11	
12	EMI	P	- ..	12	
13	AYU JULIA	P	.. -	13	
14	JULIANI	P	Marapalam	14	
15	GUSRITA	P	Lubuk kai	15	
16	WIDYA WATI	P	Lubuk Bay	16	
17	EPIS	P	- / - /	17	
18	DESI SUSILAWATI	P	Marapala	18	
19	PUJI ULUMAH	L	Marapalam	19	
20	YUSNIAP	P	Jauh Bay	20	

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
21	DELMIATI	P	L13-BAY	21 	
22	NOVA YOSE	P	- 11 -		22 
23	PENI POPITA	P	- 1 -	23 	
24	YURNINGSIH	P	CABUH		24 
25	MULIA FIDRIANI	P	TJ. DURIANI	25 	
26	GUS NED	P	TJ. DURIANI		26 
27	ZURNIAINI	P	TJ. LBY	27 	
28	SYAHRIAC	L	CABUH		28 
29	LOWARMAH	L	CABUH	29 	
30	WIKARI	L	LEBAH		30 
31	JONI AFRIANTO	L	CABUH	31 	
32	JUSMANELI	P	MARAPALAM		32 
33	GUSRIAL	L	MARAPALAM	33 	
34	FERI GUSNIDI	L	MARAPALAM		34 
35	DIAN MARDIANU	L	lubuk bay	35 	
36	WIRA	P	"		36 
37	SANTI	P	"	37	
38	Na	P			38 
39	DES	L	"	39 	
40	the	L	- 11 -		40 
41	ILHAM	L	- 11 -	41 	
42	PISMAHYANI	P	JAMBU		42 
43	INDA PAINATO	L	PDP	43 	
44	YUNOFRIZAL	L	Marapalam		44 

NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
HERAWATI	P	LE-Bay	45	46
SAMIT	P	Marapalann		
ARDI	L		47	48
Endriana	P	Marapalann		
erneni	P	Tj. Bay.	49	50
HENDRA-S	L	-11-		
Amri BACHAR	P	Belant	51	52
ANDI	L	T. drian		
Hardin...	L	T	53	54
Xenozon	L	W Korp.		
Difa Asyulia	P	tho. bay	55	56
Seimayanti	P	Tj. Durian		
Sridarmawenti	P	Marapalann	57	58
HEJIDA YANTI	P	Labuk BAY		
Deft	P	Labuk bay	59	60
PAPIT	L	LABUH		
MEKRODA	L	Labuk Bay	61	62
Agus Sari Yanti	L	Kampung Labuh		
Syafriul S	L	Blai PID Bay	63	64
EDISON	L	WN NEGARI		
Rosi GEMAREI	P	Labuh	65	66
Ami MAELINA	P	Labuh		
Yermanto	L	Labuh	67	68
Yusanti	P	Marapalann		



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

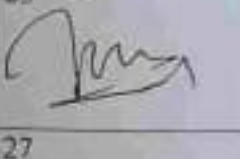
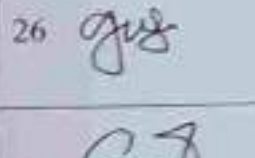
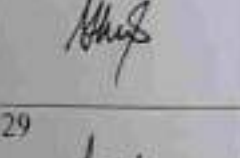
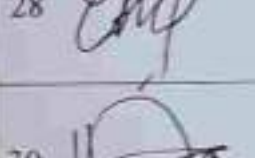
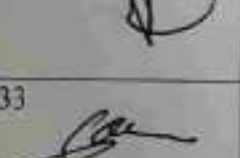
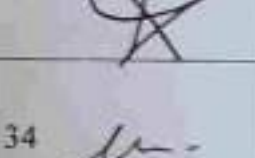
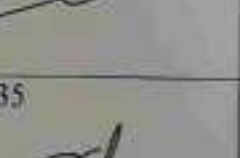
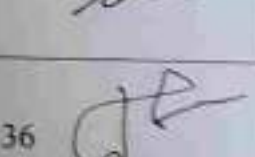
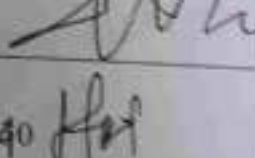
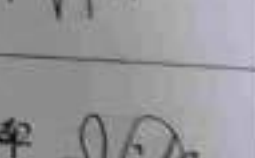
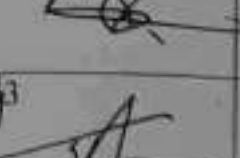
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DAFTAR HADIR

: Rabu
: 05 September 2018
: Penyusunan Rancangan RPSM Nagari

NO	NAMA	LP	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	MOMOM	L	LK Tg. AV	1	
2	ISWA WITRA	L	Padang	2	
3	SUFERTINUS MDURU	L	Padang	3	
4	SIMPAN Pradita P	L	"	4	
5	YUNI ASTUTI	P	"	5	
6	Dina Lorenza	P	"	6	
7	Nela Purriana	P	"	7	
8	Elvi Ramadhani	P	"	8	
9	RAHMADANI	P	"	9	
10	Henri Prasetya	L	"	10	
11	Robi Eka Putra	L	"	11	
12	ROZI PERMANDA	L	"	12	
13	MATJONI	L	Tg. Dufian	13	
14	ALPENDRI YUSDA	L	Marpolan	14	
15	Gusti Anggi Prihara	L	Tg. Dufian	15	
16	TAT	L	LB. Bay	16	
17	EAMAWATI	P	LB. Bay	17	
18	RITA	P	Tg. Dufian	18	
19	GUARDI HT	L	LK Bay	19	
20	IWAM	L	LB Bay	20	

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
21	DIAN MARDIAN	L	TJ. DURIAN	21	
22	HENDRA SAPUTRA	L	- 11 -	22	
23	JONI AFRIATO	L	11	23	
24	Tri darmawati	P	- 11 -	24	
25	Srimayenti	P	- 11 -	25	
26	YUSRITA	P	- 1 -	26	
27	YURNINGSIA	P	- 1 -	27	
28	Endriani	P	TJ. DURIAN	28	
29	- Jungsipi	P	- 11 -	29	
30	Desi Susilawati	P	- 11 -	30	
31	ADWAN.	L	Marapalam	31	
32	Yunofrizal	L	- 11 -	32	
33	Emli	L	- 11 -	33	
34	WEL	P	- 11 -	34	
35	ale	L	- 1 -	35	
36	Syahril	L	TJ. DURIAN	36	
37	BUSRIH	L	TJ. DURIAN	37	
38	MECKDANA	L	- 11 -	38	
39	PUADI	L	- 11 -	39	
40	DELITRA	L	TJ. DURIAN	40	
41	Musli	L	- 11 -	41	
42	EPIS	L	11	42	
43	SABARNI BAKHTAR	P	GR. LAWEH	43	
44	YONDRIZAL	L	K. KAMP.	44	

[illegible]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI
PENYUSUNAN RPJM - NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah Nagari, telah diadakan musyawarah Nagari di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan RPJM-Nagari, maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 13.30 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari

Yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur Perangkat Nagari, Bamus, Wakil-wakil Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Nagari ini adalah :

A. Materi

1. Penjabaran Visi dan Misi Program Kegiatan Pembangunan dari Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Periode 2018-2024,
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber

Pemimpin Musyawarah	Hardimen, S.Pdi	dari Bamus (Ketua)
Notulen	Yulianti, S.Kom	dari Sekretaris Nagari
Narasumber	Indre	dari PD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RPJM Nagari yaitu :

1. Penandatanganan Berita Acara,
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari dan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKP Nag) berdasar RPJM Nag Tahun 2018-2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 29 Agustus 2018



Ketua BAMUS



HARDIMEN, S.Pdi

Wakil Masyarakat



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 29 Agustus 2018
 Acara : Musyawarah Nagari / Penyusunan RPJM Nagari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YARNELI	MASYAFAKAT	1
2	DIYA AS-YULIA	BUNANG	2
3	SRIYEL YULI ANASTA	BUNANG	3
4	SRI MAYENTI		4
5	ASRI K		5
6	DELPITERA		6
7	SUCOI, HT	BANUS	7
8	WIRAWATI		8
9	YUSFRIMEN		9
10	EDO SAPURA		10
11	SUSRITA		11
12	MUSLIM		12
13	AHMAD AFDALI		13
14	VIRI EKA NANDA		14
15	IRDON RULLYA		15
16	EPIS		16
17	ALWIS IMAM KAGO		17
18	HEFIDA YANTI		18
19	GUSHIAR		19
20	PURDI LUKMAN		20
21	YONDRIZAL		21
22	ULSA ULAN SARI		22
23	ADMAN	BANUS	23
24	JULIANI	Perwakilan Nagari	24
25	FITRIA SULAFIS		25
26	EKA PAM BURI	TA. P3MD	26
27	HAM DANI		27
28	HENDRA S		28

29	SABARNI BAKHTAR SARI	PLD	29		30	
30	YUSRI KAMPAN					
31	MIMI MARLINA	Pesangkat Nagari	31			
32	Rosi Gurnanti	Pesangkat Nagari				
33	DEDI ERMATA	PD	33			
34	DEDI TORIA	KIRI EKORANO				
35	ELDI ALIS	Ramus	35			
36	SUSMITA					
37	Syafri		37			
38	MEKPO-26	MASYARAKAT				
39	Wahyu Ichi	Pesangkat Nagari	39			
40	SAFFRIAN & SE	W. N.				
41	Nusmanto	Kaw. T. U. Uman	41			
42						
43			43			
44						
45			45			
46						
47			47			
48						
49			49			
50						

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor 5 BMS/TJD-PB/2018

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TENTANG
PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI
(RPJM-NAGARI) TAHUN 2018-2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EDISON : Wali Nagari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HARDIMEN, S.Pd : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BAMUS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM-Nagari Tahun 2018-2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM-Nagari Tahun 2018-2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bayang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Kedua

HARDIMEN, S.Pd

DAFTAR HADIR

441050

02 October 2018

Kasapokatan Parnag R.P.J.M. Nagar :

NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN	
Heri Sdn Indra	L	Kasi per.	1	2
Yusmanto	L	Kaur TU	3	4
Wahyu Hahi	L	Bendahara	5	6
Heri	L	Staf	7	8
Rosi Gumaveli	P	Kasi Pelayanan	9	10
Suci Wahwani	P	Staf Barmus	11	12
Mimi Marlina	P	Kaur. Perencanaan	13	14
Hardiman	L	K-l. Barmus	15	16
EPIS	L		17	18
Edison	L	W N TJ Durina	19	20
ADNAN.	L	W-l. Barmus	21	22
Pisnanyani	?		23	24
Julianti	P	seknag	25	26
			27	28
			29	30
			31	32
			33	34
			35	36
			37	38
			39	40
			41	42
			43	44
			45	46
			47	48
			49	50
			51	52
			53	54
			55	56
			57	58
			59	60
			61	62
			63	64
			65	66
			67	68
			69	70
			71	72
			73	74
			75	76
			77	78
			79	80
			81	82
			83	84
			85	86
			87	88
			89	90
			91	92
			93	94
			95	96
			97	98
			99	100

**FOTO DOKUMENTASI
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEAADAAN NAGARI
KAMIS / 23 AGUSTUS 2018**



**FOTO DOKUMENTASI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI
RABU / 05 SEPTEMBER 2018**



FOTO DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
JUM'AT / 21 SEPTEMBER 2018

